



BUKU PROFIL



**INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI**

TAHUN 2022



BUKU PROFIL



**INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI**

TAHUN 2022



SELAMAT DATANG

DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DAFTAR ISI

DAFTAR

ISI.....	3
PENGANTAR.....	6
BAGIAN I. PENDAHULUAN.....	8
1.1 Sejarah IPDN.....	8
1.2 Visi, Misi dan Tujuan.....	19
1.3 Rencana Induk dan Arah Pengembangan 2020-2045.....	21
1.4 Rencana Strategis 2020-2024.....	22
1.5 Statuta.....	22
1.6 Kampus IPDN.....	23
BAGIAN II. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	24
2.1 Struktur Organisasi.....	24
2.2 Sumber Daya Manusia.....	27
BAGIAN III. PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	28
3.1 Bidang Pengajaran.....	28
3.1.1 Jenjang Pendidikan.....	28
3.1.2 Sistem Pendidikan.....	32
3.1.3 Pedoman Pembinaan Pendidikan Kepamongprajaan.....	33
3.1.4 Peserta Didik.....	34
3.1.5 Alumni.....	42
3.2 Bidang Penelitian.....	55
3.3 Bidang Pengabdian Masyarakat.....	58
BAGIAN IV. STANDAR PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN.....	61
4.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	61
4.2 Akreditasi.....	62
BAGIAN V. SARANA DAN PRASARANA.....	71
5. 1 Sarana Prasarana IPDN Jatinangor.....	71
BAGIAN VI. KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI.....	67
6.1 Kerja Sama Dalam Negeri.....	67
6.2 Kerja Sama Luar Negeri.....	67

BAGIAN VII. KEGIATAN PRAKTISI DALAM RANGKA

PENINGKATAN KAPASITAS PRAJA DAN CIVITAS AKADEMIKA.....69

7.1 Stadium General/Kuliah Umum.....69

7.2 Seminar Strategis.....75

7.3 Kerja Sama

.....75

BAGIAN VIII. PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN RENOVASI.....76

8.1 Penataan.....76

8.1.1 Penataan Bidang Pendidikan.....76

8.2 Pembangunan.....87

BAGIAN IX. PENUTUP.....90

PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya penulisan buku Profil Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2020-2022 dapat diselesaikan sesuai agenda. IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mendidik kader-kader pemerintahan dalam negeri yang bertugas melayani masyarakat dan mempersatu bangsa dan negara.

Penyusunan buku Profil IPDN ini dimaksudkan untuk memberikan informasi penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan dengan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan baik kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) yang dimiliki IPDN, struktur organisasi, sarana dan prasarana pendidikan, lokasi kampus, Kerja sama dalam dan luar negeri, kegiatan praktisi dalam rangka peningkatan kapasitas praja dan civitas akademika serta kegiatan penataan dan pembangunan IPDN. Diharapkan dengan kehadiran Buku Profil IPDN 2020-2022 dapat memberikan gambaran actual tentang Lembaga IPDN agar semakin dikenal luas oleh masyarakat dan pemerintahan daerah.

Kami menyadari materi yang disajikan dan Buku Profil IPDN ini masih jauh dari kelengkapan dan kesempurnaan, untuk itu kami mohon masukan konstruktif dari pembaca terutama dari penyelenggara IPDN. Hanya dengan cara demikian, kita dapat membangun sistem informasi IPDN yang dapat dikenal oleh masyarakat umum. Semoga informasi tentang IPDN yang tersaji dalam Buku Profil IPDN ini dapat bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat, selamat membaca.

Rektor

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM



BAGIAN I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Pendidikan kepomongprajaan dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) dan *Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (MOSVIA), *Opleiding School Indische Ambtenaren* (OSIBA). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Di masa pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yang bernama *Binnenlands Bestuur Corps* (BBC) dan pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuur Corps (IBC). Pada masa Hindia Belanda nama Pamong Praja belum dikenal dan yang dikenal hanya nama Pangreh Pradja yang berperan sebagai pelaksana tugas dari dan untuk kepentingan penjajah semata.



Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)



Siswa OSVIA Bandung



Pendidikan MOSVIA Tahun 1948
Pendidikan Pangreh Praja Tingkat Menengah

Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan nasional dan daerah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat. Dengan diberlakukannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, maka tugas Presiden dan Wakil Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Daerah (KND). Secara empirik pada masa awal kemerdekaan, Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain dibantu KND juga dibantu oleh kelompok Pangreh Pradja jajaran pegawai eks Hindia Belanda yang dalam kenyataan masih aktif dalam mengurus urusan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Mengingat masih pentingnya peran kelompok Pangreh Pradja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan pada masa awal kemerdekaan, maka pada tahun 1946, Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Radja Paku Alaman Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat No.10 Tahun 1946 tanggal 13 Februari 1946 tentang Perubahan Nama Pangreh Pradja menjadi Pamong Pradja. Kutipan langsung maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menimbang bahwa kedudukan dan kewadajiban Pangreh Pradja dalam Negara jang telah merdeka lain dengan tatkala dalam djaman pendjadjahan dan nama Pamong Pradja sesuai dengan kedudukan dan kewadajiban Pangreh Pradja masa ini.
- b. Maka kami berdua, Sri Paduka Ingkang Sinuhun Kanidjon Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kanidjon Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewah Negara Republik Indonesia, semurakat dengan Badan Pekerdja Komite. Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta memutuskan:
 1. Pangreh Pradja dalam daerah Kami berdua untuk selandjutnja diganti dengan nama Pamong Pradja, dan memerintahkan kepada segenap pegawai Pamong Pradja supaja mereka berpendirian, bersikap, dan bertindak jang sesuai dengan kedudukan dan kewadajiban mereka dalam Negara jang merdeka, agar perubahan nama ini djuga berarti bekerdja bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin rakjat jang djadi tanggungannja kearah kesempurnaan.

2. Kepada pemimpin-pemimpin dan rakjat supaja membantu usaha Pamong Pradja dengan tenaga dan pikirannja, dan dengan mempertebal rasa pertjaja mempertjajai, untuk melaksanakan kewadajiban jang dipikulkan pada Pamong Pradja itu.

c. Maklumat ini mulai berlaku sedjak diumumkan.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di awal kemerdekaan dan untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.

Pada Tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang Jawa Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan D yang siap pakai dalam melaksanakan tugas. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya dan Mataram.



Pendidikan Kursus Dinas C (KDC) Tahun 1952

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong Kementerian Dalam Negeri membentuk akademi pemerintahan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pend. 1/20/26 tanggal 24 September 1955 tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peresmian berdirinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur oleh Presiden Soekarno, dengan amanat antara lain mengatakan bahwa “APDN hendaknya merupakan suatu pusat *investment of human skills* dan *mental investment* dan pentingnya *managerial skills*

dan efisiensi administrasi di dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah”. Direktur APDN Malang pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional pertama direkrut dari lulusan KDC secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pamong praja dengan gelar Sarjana Muda “*Bachelor of Art (BA)*”.



Peresmian APDN Malang oleh Presiden Soekarno 17 Maret 1956

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang “*qualified leadership and manager administrative*”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk pendidikan tinggi bagi studi lanjutan pada tingkat Sarjana lengkap bagi lulusan APDN. Usaha dan dorongan serta kerja keras dari para penyelenggara dan alumni APDN Nasional Malang mencapai puncak pada tanggal 25 Mei 1967 Menteri Dalam Negeri meresmikan berdirinya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur. Pembentukan IIP berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 1967, yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967.

Pada tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto dan menyatakan bahwa: “Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam fase pematangan penyelenggaraan IIP sebagai peningkatan dari APDN Nasional di Malang, penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi oleh Kementerian Dalam Negeri secara bertahap membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur dan hingga dekade 70-an berjumlah 20 APDN yang berlokasi di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura. Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan, Menteri Dalam Negeri pada saat itu Rudini, mengeluarkan kebijakan penyatuan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di 20 Provinsi pada satu tempat penyelenggaraan pendidikan yang bersifat Nasional di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Setelah terbentuknya APDN Nasional ini, kegiatan operasional pendidikan di 20 APDN secara bertahap dihentikan hingga menyelesaikan lulusan terakhir pada tahun 1991. Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang penyatuan 20 APDN tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. Peresmian penyatuan APDN Nasional yang berkedudukan di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini pada tanggal 18 Agustus 1990.

Mengingat perkembangan kebutuhan akan lulusan Pamong Praja, APDN Nasional ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Peningkatan APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Agustus 1992. Berdasarkan keputusan Presiden ini, status APDN Nasional dengan Program Studi Diploma Tiga (DIII) Pemerintahan berubah menjadi Program Studi Diploma Empat (DIV) Pemerintahan.



Praja STPDN

Sejak tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri memiliki dua lembaga pendidikan kedinasan yaitu STPDN dengan program pendidikan vokasi Diploma Empat (DIV) Pemerintahan dan IIP yang



Peresmian Kampus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPN) Oleh Presiden H. M. Soeharto



Pelantikan Pamong Praja Muda Oleh Presiden H. M. Soeharto

menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan. Lulusan STPDN dan Lulusan IIP menyandang golongan kepangkatan yang sama yakni Penata Muda Golongan Ruang (III/a). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa satu Departemen tidak boleh memiliki dan menyelenggarakan dua atau lebih perguruan tinggi dalam bidang keilmuan yang sama. Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini kemudian mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mendesain rencana mengintegrasikan STPDN dan IIP ke dalam satu wadah pendidikan tinggi. Usaha pengintegrasian STPDN dan IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 membuahkan hasil dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam

Negeri (IPDN) dengan lokasi pembelajaran di dua kampus yaitu Kampus Jatinangor (ex STPDN) dan Kampus Jakarta (ex IIP). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan sistem pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Penjabaran lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004, ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.



Peresmian Institut Pemerintahan Dalam Negeri oleh Presiden Hj. Megawati Soekarno Putri

Pada tahun 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembenahan sistem pendidikan IPDN dengan mengeluarkan arahan kebijakan yaitu:

1. Kegiatan internal Praja (Wahana Bina Praja/WBP) dibekukan, baik kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus;
2. Organisasi pengasuhan perlu dilaksanakan reformasi dan dirombak agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, profesional, bertanggung jawab, dan mengayomi;
3. Pengawasan kegiatan Praja baik intra maupun ekstra kurikuler di dalam dan luar kampus diawasi oleh lembaga secara penuh;
4. Bentuk tim evaluasi lintas Departemen yang melibatkan unsur non pemerintah, untuk mengevaluasi secara menyeluruh baik yang berkaitan dengan sistem maupun metodologi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
5. Penerimaan Praja baru ditunda selama satu tahun.

Menindaklanjuti amanat untuk melakukan perubahan fundamental IPDN, Presiden membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN yang terdiri dari sembilan orang dengan komposisi yaitu: Prof. Muhammad Ryaas Rasyid, MA, Ph.D (Ketua); Prof. Dr. Arief Rahman, MPd (Wakil Ketua); Drs. Seman Widjojo, M.Si (Anggota); Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc (Anggota); Prof. Ir. Supeno Djanali, M.Sc, PhD (Anggota); Prof. Muchlis Hamdi, MPA, PhD (Anggota), Drs. Nasruddin, M.Si (Anggota); Dra. Ratna Djuwita Chaidir, Dipl, Psych (Anggota); dan Dra. Rini Panganti (Anggota). Tugas Tim Sembilan adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di IPDN dengan tujuan memperoleh pemahaman kelayakan IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan dalam mencetak kader Pamong Praja, serta memperoleh alternatif solusi lembaga pembinaan kader pemerintahan ini yang berwawasan keilmuan, demokratis, beretika, dan memiliki moralitas yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tim Evaluasi Pendidikan IPDN bekerja cepat dan melaporkan hasil kerja kepada Presiden dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) rekrutmen yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya; (2) penerapan kurikulum yang padat sehingga tidak membuka ruang yang cukup untuk kreativitas Praja; (3) lemahnya kemampuan para dosen dalam mengkomunikasikan ilmu yang secara sistematis mampu merangkum seluruh aspek logika, estetika dan etika dari mahasiswa; (4) kehidupan kampus yang menekan dan kurang kondusif, seperti asrama yang padat dan tidak membuka ruang privacy; (5) tidak tersedianya unit-unit pengaduan bagi Praja yang diperlakukan tidak adil oleh senior, pengasuh, dosen dan staf lembaga; (6) tidak tersedianya mekanisme kontrol dan koreksi internal dalam sistem kehidupan lembaga; serta (7) ketiadaan supervisi kepemimpinan dari Departemen Dalam Negeri dan Rektor beserta jajarannya terhadap seluruh kehidupan di Kampus. Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN, merekomendasikan beberapa opsi sebagai berikut:

Melanjutkan dengan Perubahan Sistem.

1. Kampus Jatinangor dipertahankan sebagai pusat pendidikan kader Pamong Praja di bawah kendali Departemen Dalam Negeri dengan supervisi Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian PAN. Nama dikembalikan menjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP);
2. Sistem pendidikan sepenuhnya berorientasi akademik dengan kurikulum yang menyeimbangkan aspek fungsional, kontekstual, dan filosofis keilmuan pemerintahan dan ilmu-ilmu lain;
3. Kegiatan pelatihan diarahkan pada peningkatan berbagai jenis keterampilan, baiknya yang memperkaya pengetahuan, meningkatkan daya kreativitas dan sensitivitas spiritual, dan sosiokultural;
4. Kegiatan pengasuhan dihentikan sama sekali;
5. Hubungan antar praja sebagai hubungan sosial yang biasa saja.

Pembangunan APDN Regional.

1. Kampus Jatinangor ditutup dan dikonversi menjadi kampus pusat seluruh pelaksanaan Diklat di lingkungan Depdagri;

Selain hasil evaluasi tim yang dibentuk Presiden, Komisi II DPR-RI juga membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi ke IPDN. Hasil evaluasi IPDN oleh Tim DPR bahwa diperlukan penataan menyeluruh sistem pendidikan di IPDN dengan rekomendasi antara lain: (1) IPDN dilebur dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya, pengasuhan di rombak; (2) kurikulum dirubah; (3) penataan ulang tenaga pendidikan; (4) menata hubungan kerja yang harmonis antara IPDN dan Departemen Dalam Negeri; dan (5) regionalisasi lokasi pembelajaran IPDN di beberapa provinsi.

Berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi IPDN yang dibentuk oleh Presiden dan Komisi II DPR-RI di atas, Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 890.05-506 Tahun 2007, dengan tugas menata sistem penyelenggaraan pendidikan, menata kelembagaan dan personil, serta menata sarana dan prasarana. Keanggotaannya terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berdasarkan Rapat Kabinet pada tanggal 11 Oktober 2007 dengan agenda utama paparan hasil kerja Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan kebijakan penataan pendidikan tinggi kepomongprajaan dengan mengambil keputusan penggabungan Opsi Pertama dan Opsi Kedua, yaitu melanjutkan perubahan sistem pendidikan untuk menjamin kontinuitas pendidikan kader pemerintahan yang berakar kuat dalam sejarah pendidikan kepomongprajaan di Indonesia, mulai dari KDC, APDN dan IIP selama lebih dari setengah abad, dan kecocokannya dengan aspirasi otonomi daerah yang semakin membutuhkan banyaknya kader pemerintahan untuk mengisi pos terdepan kelurahan dan kecamatan. Menindaklanjuti hasil Rapat Kabinet dimaksud, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN Ke dalam IIP menjadi IPDN. Perpres tersebut mengamanatkan bahwa “penataan sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pendidikan tinggi kepomongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, serta Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.”

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, yang menetapkan bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepomongprajaan. Selanjutnya sebagai penjabaran lebih lanjut dari rekomendasi di atas, kelembagaan IPDN dibentuk di 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kampus IPDN Sumatera Barat di Bukit Tinggi menyelenggarakan program studi keuangan daerah; Kampus IPDN Riau di Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan, catatan telah ditutup pada tahun 2018; Kampus IPDN Kalimantan Barat di Kubu Raya menyelenggarakan program studi manajemen sumberdaya aparatur; Kampus IPDN Sulawesi

Selatan di Pancekalan Gowa menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan; Kampus IPDN Sulawesi Utara di Tondano menyelenggarakan program studi administrasi kependudukan dan catatan sipil; Kampus IPDN Nusa Tenggara Barat di Mataram menyelenggarakan program studi politik pemerintahan, dan Kampus IPDN Papua di Jayapura menyelenggarakan program studi politik pemerintahan.

Setelah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 dengan sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN, secara kelembagaan pada lingkup Kampus Pusat Jatinangor dan Jakarta telah terbentuk 2 (dua) Fakultas yaitu: pertama, Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Politik Pemerintahan dan Program Studi Pembangunan dan pemberdayaan untuk Program Diploma Empat (DIV), serta Program Studi Kebijakan Pemerintahan untuk Program Studi Strata Satu (S1); dan kedua, Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi Program Diploma Empat (DIV) yaitu Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Program Studi Keuangan Daerah, dan Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, terdapat empat Program Studi Strata Satu (S1) yaitu Program Studi Manajemen Pemerintahan, Program Studi Manajemen Keuangan Daerah, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Program Studi Manajemen Pembangunan. Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma Empat (D-IV) pada semester I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Selain itu, diterapkan alih program dari Program Diploma Empat (D-IV) ke Program Strata Satu (S1) bagi praja lulusan terbaik setiap provinsi pada semester III, IV, V, VI, VII dan VIII. Langkah kebijakan alih program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penjurusan pada beberapa program studi yang dinilai sebagai suatu kebutuhan. Penyelenggaraan pendidikan program diploma empat (D-IV) diselenggarakan pada Kampus IPDN Jatinangor, sedangkan program pendidikan strata satu (S1) diselenggarakan pada Kampus IPDN di Cilindak Jakarta.

Seiring dengan perjalanan waktu melalui suatu proses panjang, pada tahun 2000 Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 3765/D/T/2000 Tanggal 20 Oktober 2000 memberikan izin penyelenggaraan Program Akademik Strata Dua (S-2) Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD). Izin penyelenggaraan Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 429-373 Tahun 2001 Tanggal 18 September 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Sampai dengan saat ini, program magister administrasi pemerintahan telah meluluskan 4500 orang Magister Pemerintahan.

Pada tahun 2012, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional juga mengeluarkan Surat Mandat Nomor 321/E/T/2012 tanggal 22 Februari tahun 2012 yang ditujukan kepada Rektor IPDN dengan penugasan menyelenggarakan Program Profesi Kepamongprajaan. Surat mandat Dirjen Dikti ini dikukuhkan dalam Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 370/KPT/1/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Kepamongprajaan pada IPDN.

Saat ini Program Profesi Kepamongprajaan IPDN telah menyelenggarakan VI Angkatan dengan jumlah lulusan 350 orang.

Pada tahun 2013 setelah melalui perjuangan yang panjang, kembali Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/E/0/2013 memberikan izin kepada IPDN untuk menyelenggarakan Program Akademik Strata Tiga (S3) Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan. Hingga saat ini, program doktor ilmu pemerintahan telah meluluskan 96 orang Doktor Ilmu Pemerintahan.

Pada tanggal 15 Juni 2015, IPDN dicanangkan sebagai Kampus Pelopor dan Penggerak Revolusi Mental oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.



Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Bersama Presiden Joko Widodo

1.2 Visi, Misi dan Tujuan

Visi IPDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor IPDN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2045 dan Peraturan Rektor IPDN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis IPDN Tahun 2020-2024 yaitu: **“Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, Berdaya Saing pada Tahun 2045”**.

Misi IPDN sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan kepomongprajaan dengan mengembangkan, membina dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktek pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal;
3. Mengembangkan pendidikan kepomongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah daerah serta kemajuan masyarakat;
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.

Tujuan IPDN sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan pamong praja yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian Pancasila, memiliki keunggulan, profesional dan berintegritas.
2. Menghasilkan, lulusan pamong praja yang dapat mengembangkan, memberdayakan, dan menerapkan ilmu terapan kepomongprajaan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menghasilkan pembentukan lulusan kader pemerintahan dalam negeri sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan IPDN yang memenuhi delapan pedoman pembinaan kader Pamong Praja (Astha Brata) yaitu:
 - a. Berjiwa Pancasila;
 - b. Unggul, Profesional dan Berintegritas;
 - c. Menguasai IPTEK dan Berdaya Saing;
 - d. Kader Revolusi Mental dan Agen Perubahan;
 - e. Mengayomi, Melayani dan Melindungi Masyarakat;
 - f. Perekat Persatuan dan Kesatuan NKRI;
 - g. Berwawasan Nasional dan Global; dan
 - h. Adaptif, Inovatif, Produktif, Kompetitif.



Praja dalam Berbagai Seragam

1.3 Rencana Induk dan Arah Pengembangan 2020-2045

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020), arah pengembangan IPDN dalam 25 (dua puluh lima) tahun kedepan (2020-2045) terdiri atas 5 (lima) tahapan yaitu:

1. Tahap I Tahun 2020-2024, IPDN menjadi Perguruan Tinggi Sehat;
2. Tahap II Tahun 2025-2029, IPDN sebagai Perguruan Tinggi yang mampu menghasilkan Pamong Praja inovatif dalam menjalankan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Tahap III Tahun 2030-2034, IPDN sebagai Perguruan Tinggi yang menjadi pusat studi dan riset Ilmu Pemerintahan Terapan;
4. Tahap IV Tahun 2035-2039, IPDN sebagai Perguruan Tinggi yang menjadi pusat rujukan studi perbandingan Ilmu Pemerintahan Terapan antar negara-negara berkembang;
5. Tahap V Tahun 2040-2045, IPDN sebagai Perguruan Tinggi yang memiliki daya saing global.

1.4 Rencana Strategis 2020-2024

Saat ini IPDN sedang berada pada Tahap I pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan IPDN, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020) dengan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang unggul dan berkualitas;
2. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan pemerintahan yang terkait dengan penyelesaian isu-isu nasional dan internasional;
3. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat;
4. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan Praja untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni;
5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN;
6. Pengembangan tata kelola IPDN yang sehat dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi.

1.5 Statuta

Statuta IPDN saat ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018. Perubahan mendasar dalam Statuta IPDN yang baru ini antara lain:

1. Penajaman kembali visi dan misi IPDN;
2. Penajaman tujuan dan karakteristik IPDN;
3. Perubahan Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana;
4. Penajaman Program Studi Profesi Kepamongprajaan menjadi Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dengan durasi waktu pembelajaran menjadi 3 (tiga) bulan dari sebelumnya 9 (sembilan) bulan;
5. Perubahan nomenklatur penyebutan tingkatan Praja yaitu Praja Pratama untuk Tingkat I, Praja Muda untuk Tingkat II, Praja Madya untuk Tingkat III, dan Praja Utama untuk Tingkat IV;
6. Penataan Satuan Pengawas Internal berdiri sendiri langsung bertanggung jawab kepada Rektor yang sebelumnya berada di bawah Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Internal;
7. Pengaturan Satuan Manggala Praja dan Satuan Bina Pelatihan Praja sebagai pelaksana akademik;
8. Perubahan logo dan bendera IPDN;
9. Dengan lahirnya Statuta IPDN yang baru ini dan disemangati kebijakan penyederhanaan Reformasi Birokrasi melalui perampingan jabatan struktural yang dialihkan menjadi jabatan fungsional.

1.6 Kampus IPDN

Kampus pembelajaran IPDN terdiri atas Kampus Pusat dan Kampus Daerah, yakni sebagai berikut:

- a. Kampus Pusat berlokasi di Jatinangor dan Jakarta;



IPDN Kampus Jatinangor

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor - Sumedang, Jawa Barat 45363



IPDN Kampus Jakarta

Jl. Ampera Raya No.1, RT.1/RW.6, Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560.

- b. Kampus Daerah IPDN:



Kampus Sumatera Barat

Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh, Tabek Panjang, Kec. Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat 26192.



Kampus Sulawesi Selatan

Jl. Je'ne Madinding Desa Kampili, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Makassar



Kampus Sulawesi Utara

Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa



Kampus Kalimantan Barat

Jl. Raya Pontianak Mempawah, Desa sungai purun besar, Kec. segedong, Kab. Mempawah



Kampus Nusa Tenggara Barat

Jl. Gajah Mada No.1, Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83522



Kampus Papua

Jl. Bumi Perkemahan Cendrawasih, Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua

BAGIAN II

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi IPDN ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Rektor selaku penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan dibantu oleh wakil rektor, yang terdiri dari:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama .

Fakultas sebagai unsur pelaksana akademik pengelola program studi Diploma IV terdiri dari:

1. Fakultas Politik Pemerintahan;
2. Fakultas Manajemen Pemerintahan;
3. Fakultas Perlindungan Masyarakat.

Dalam rangka pengembangan keilmuan pemerintahan secara akademik maupun terapan maka selain program pendidikan Diploma IV yang dikelola fakultas, juga dibentuk:

1. Sekolah Pasca Sarjana
2. Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Unsur penunjang akademik yang berbentuk lembaga terdiri dari:

1. Lembaga Pengabdian Masyarakat
2. Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan
3. Lembaga Pengawas dan Penjaminan Mutu Internal

Unsur penunjang lainnya adalah:

1. Komisi Disiplin Praja;
2. Unit Bimbingan dan Konseling Praja;
3. Unit Laboratorium dan Museum Sejarah Pemerintahan;
4. Unit Laboratorium Bahasa;

5. Unit Perpustakaan;

6. Unit Poliklinik

Unsur pelaksana administrasi terdiri dari:

1. Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan;
2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni;
4. Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Struktur Organisasi



Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Dr. Drs. Hadi Prabowo. M.M.



Wakil Rektor Bidang Akademik
Dr. Hyronimus Rowa, M.Si



Wakil Rektor Bidang Administrasi
Dr. Drs. Rizari, M.B.A., M.Si



Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si



Wakil Rektor Bidang Kerja Sama
Dr. Dety Mulyati, S.H., M.H., C.N



Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Perencanaan
Agoes Toyib, S.Sos., M.Si



Kepala Biro Administrasi
Umum dan Keuangan
Bisri, S.Sos., M.Si



Kepala Biro Administrasi
Keprajaan dan Kemahasiswaan
Drs. Baharuddin Pabba, M.Si



Kepala Biro Administrasi
Kerja Sama dan Hukum
Dr. H. Arief M. Edie, M.Si



Dekan Fakultas Politik Pemerintahan
Dr. Andi Pitono, M.Si.



Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan
Dr. Halilul Khairi, M.Si



Dekan Fakultas Perlindungan
Masyarakat
Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd.

2.2 Sumber Daya Manusia

Dosen tetap IPDN saat ini berjumlah 298 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel Sebaran Dosen IPDN Pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana

No	Unit Kerja	Jabatan Fungsional				Jumlah
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	
1.	Fakultas Politik Pemerintahan	3	11	55	14	83
2.	Fakultas Manajemen Pemerintahan	3	9	69	31	112
3.	Fakultas Perlindungan Masyarakat	3	12	48	17	80
4.	Sekolah Pascasarjana	5	13	5	0	23
Total		14	45	177	62	298

Pelatihan di IPDN dilaksanakan oleh dosen dan para praktisi yang memiliki sertifikasi keahlian spesifik sesuai materi yang diajarkan. Selain berasal dari internal IPDN, pelatih juga didatangkan dari berbagai instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan SAR Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota Bandung, maupun Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Pembinaan mental dan kehidupan asrama praja dilakukan oleh para Pengasuh IPDN, yang saat ini berjumlah 168 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kampus Jatinangor sejumlah 86 orang, terdiri dari 63 pengasuh putra dan 23 pengasuh putri;
2. Kampus Jakarta sejumlah 9 orang, terdiri dari 4 pengasuh putra dan 5 pengasuh putri;
3. Kampus Sumatera Barat sejumlah 10 orang, terdiri dari 6 pengasuh putra dan 4 pengasuh putri;
4. Kampus Kalimantan Barat sejumlah 7 orang, terdiri dari 4 pengasuh putra dan 3 pengasuh putri;
5. Kampus Nusa Tenggara Barat sejumlah 8 orang, terdiri dari 3 pengasuh putra dan 5 pengasuh putri;
6. Kampus Sulawesi Utara sejumlah 9 orang, terdiri dari 6 pengasuh putra dan 3 pengasuh putri;
7. Kampus Sulawesi Selatan sejumlah 12 orang, terdiri dari 8 pengasuh putra dan 4 pengasuh putri;
8. Kampus Papua sejumlah 9 orang, terdiri dari 6 pengasuh putra dan 3 pengasuh putri.

BAGIAN III

PELAKSANAAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

3.1 Bidang Pengajaran

3.1.1 Jenjang Pendidikan

Terdapat tiga jenis pendidikan di IPDN, yaitu pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui program sarjana terapan, pendidikan akademik diselenggarakan melalui program pascasarjana, dan pendidikan profesi dikembangkan melalui penyelenggaraan program pendidikan profesi kepamongprajaan.

Pendidikan Vokasi diselenggarakan melalui Program Sarjana Terapan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) fakultas dengan 10 (sepuluh) Program Studi. Setiap program studi menyelenggarakan pengajaran untuk menghasilkan profil lulusan yang spesifik, sebagai berikut:

a. Fakultas Politik Pemerintahan, terdiri atas 3 (tiga) Program Studi, meliputi:

1. Program Studi Politik Indonesia Terapan, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam analisis politik dalam negeri, pemerintahan umum dan otonomi daerah;
2. Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam perencanaan, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
3. Program Studi Studi Kebijakan Publik, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam melakukan analisis kebijakan yang meliputi formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan.



Gedung Fakultas Politik Pemerintahan

b. Fakultas Manajemen Pemerintahan, terdiri atas 4 Program Studi, meliputi:

1. Program Studi Keuangan Publik, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam menganalisis, mengoperasikan dan mengelola sistem informasi pemerintahan, serta merancang dan membangun aplikasi di bidang pemerintahan;
3. Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam manajemen kinerja pemerintahan daerah; dan
4. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam manajemen kepegawaian.



Gedung Fakultas Manajemen Pemerintahan

c. Fakultas Perlindungan Masyarakat, terdiri atas 3 Program Studi, meliputi:

1. Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam mitigasi, tanggap darurat dan pasca bencana;
2. Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam analisis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum serta penegakan peraturan daerah; dan
3. Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan profil lulusan pamong praja yang ahli dalam analisis kependudukan dan pencatatan sipil.



Gedung Fakultas Perlindungan Masyarakat

Selain program Sarjana Terapan di bawah pengelolaan fakultas, IPDN juga mengembangkan pendidikan Magister dan Doktor yang dikelola oleh Sekolah Pascasarjana, sebagai berikut:

1. Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan (S2), yang dibentuk sejak tahun 2001.
2. Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S3), yang dibentuk sejak tahun 2013.

IPDN juga menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, yang dimulai pada tahun 2013. Program ini diselenggarakan untuk mendidik Aparatur Sipil Negara baik yang telah menduduki jabatan Camat maupun yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan Camat namun tidak memiliki latar belakang Ilmu Pemerintahan yang merupakan amanat Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 224 tentang Persyaratan Pengangkatan Camat.



Gedung Pascasarjana IPDN

3.1.2 Sistem Pendidikan

Khusus pada Program Studi Sarjana Terapan, sistem pendidikan IPDN menerapkan Sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) Terintegrasi. Sistem ini dipandang relevan untuk membentuk calon kader pemerintahan dalam negeri yang mengabdikan diri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mampu bekerja secara profesional berdasarkan bekal pengetahuan dan keterampilan teknis pemerintahan serta memiliki karakter kepamongprajaan, mental dan kepribadian yang berintegritas.

Kesepuluh program studi sarjana terapan menerapkan kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan terintegrasi yang disusun dengan mengacu pada *Body of Knowledge* Terapan Keilmuan Pemerintahan (*Government of Science*). IPDN merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Kedinasan yang mengintegrasikan kegiatan pengasuhan berupa Penanaman, Penumbuhan, Pengembangan dan Pendewasaan Kepribadian serta Karakter Kepamongprajaan pada Kurikulum dan tersinkronisasi Indeks Prestasi Kumulatif Praja dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

Kurikulum IPDN dibentuk melalui berbagai kajian dan konsinyering dengan berbagai pihak guna menentukan metode yang tepat melalui serangkaian rapat, FGD dengan berbagai *stakeholder* selaku *user* dan Alumni, serta pembahasan substansi dan teknis bersama dengan pakar, dan melakukan konsolidasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Kurikulum IPDN mengadopsi *Model Separated* yang memisahkan SKS Kuliah dengan SKS Praktikum. Kurikulum bersifat terintegrasi dengan kekhasan IPDN dalam pembentukan sikap dan perilaku melalui Pengasuhan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang merupakan sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri memiliki *lex specialis* untuk mendidik dan membentuk kader pemerintahan yang bertugas di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah langsung berpraktek sebagai perumus dan implementor kebijakan pemerintahan.

Kurikulum IPDN disusun berdasarkan Kebijakan dari Kemendikbud Ristek yaitu “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” dimana Komposisi Kurikulum terdiri atas 60% Praktikum/Pelatihan dan 40% Teori, dengan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Terintegrasi (Jarlatsuh) dalam bangunan Kurikulum Program Sarjana Terapan. Kurikulum Jarlatsuh Terintegrasi juga telah mengadopsi Pembelajaran diluar Kampus sebanyak 16 s.d. 20 SKS yang terdiri dari Magang 1 sebanyak 4 SKS untuk Satuan Muda Praja, Magang 2 sebanyak 4 SKS untuk Satuan Madya Praja, Magang 3 sebanyak 4 SKS untuk Satuan Nindya Praja dan Bhakti Karya Praja sebanyak 4 SKS untuk Satuan Praja Utama.



Laboratorium Praktikum di IPDN



Ruang kelas IPDN

3.1.3 Pedoman Pembinaan Pendidikan Kepamongprajaan

Lulusan Program Studi Sarjana Terapan IPDN disebut juga sebagai Pamong Praja Muda. Dalam proses pembinaanya di IPDN, diterapkan delapan pedoman pembinaan kader Pamong Praja (Astha Brata) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor IPDN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2045 yaitu:

1. Berjiwa Pancasila;
2. Unggul, Profesional dan Berintegritas;
3. Menguasai IPTEK dan Berdaya Saing;
4. Kader Revolusi Mental dan Agen Perubahan;
5. Mengayomi, Melayani dan Melindungi Masyarakat;
6. Perekat Persatuan dan Kesatuan NKRI;
7. Berwawasan Nasional dan Global; dan
8. Adaptif, Inovatif, Produktif, Kompetitif.

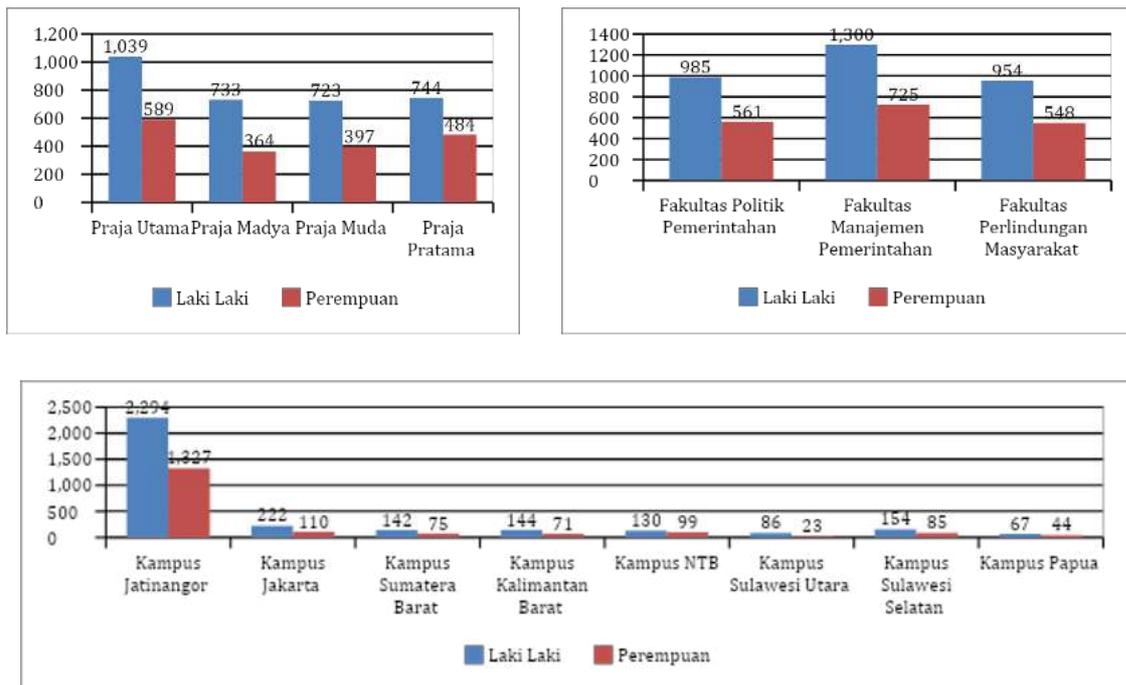


Kegiatan *E-Learning* Praja IPDN

3.1.4 Peserta Didik

Peserta didik Institut Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari Praja dan mahasiswa. Praja adalah sebutan untuk peserta didik program sarjana terapan yang merupakan peserta didik ikatan dinas, sedangkan mahasiswa adalah sebutan peserta didik tugas belajar dan ijin belajar pada program pascasarjana dan program profesi kepomongprajaan. Per tanggal 1 November 2022 jumlah peserta didik Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 5.987 Orang yang terdiri dari:

- a. Peserta didik Program Sarjana Terapan sebanyak 5.073 Orang (laki-laki sebanyak 3.329 Orang dan Perempuan sebanyak 1.834 Orang) dengan rincian sebagai berikut:



Jumlah Praja Berdasarkan Gender, Fakultas, dan Lokasi Kampus, Tahun 2022

- b. Peserta didik Sekolah Pascasarjana sebanyak 902 Orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Studi	Jumlah
1.	Magister Terapan Studi Pemerintahan	362
2.	Doktor Ilmu Pemerintahan	540
Total		902

- c. Peserta didik Program Profesi Kepomongprajaan sebanyak 12 Orang.



Sidang Promosi Doktor Program Pascasarjana IPDN



Mahasiswa Pascasarjana IPDN

Selama beberapa tahun terakhir, Praja IPDN telah berprestasi dalam berbagai ajang kompetisi nasional. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	Cabang Olahraga	Medali	Event
1	Naufal Rifan F	Renang	Emas, Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
2	Zwageri Adrian	Renang	2 Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
3	M. Fiqri Husein	Renang	Perak	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
4	Lalu M. Abdurroby	Atletik	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
5	Eklesia Magdalena Paradista Bless (Pi)	Atletik	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
6	Makdalena Lena Alua (Pi)	Atletik	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
7	Halimah	Wall Climbing	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
8	Andra Ramadlan Daud	Wall Climbing	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
9	Pranaja Hibatullah	Billyard	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019

10	Danang Yudha P.	Karate	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
11	Grymaldy Pryanka	Karate	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
12	Natasya Maharani (Pi)	Karate	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
13	Levina Barinda (Pi)	Karate	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
14	Fani Rahmasari (Pi)	Karate	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
15	Rivaldo Risella Tombokan	Karate	Perak	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
16	Mardina Victoria K. (Pi)	Karate	Perak	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
17	Yossi Adi Yan	Karate	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
18	Reno Cholifinando	Taekwondo	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
19	M. Baariq Yazid	Taekwondo	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019

20	Niken Verity Dewayana(Pi)	Taekwondo	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
21	Ria Juniar Rizkyawati (Pi)	Taekwondo	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
22	Ayu Angola (Pi)	Taekwondo	Perak	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
23	Annisa Ramadhani (Pi)	Taekwondo	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
24	Muh. Fahmi Basalama	Taekwondo	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
25	Salsa Faradina (Pi)	Taekwondo	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
26	Dinda Suci Ayu Pratiwi(Pi)	Taekwondo	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
27	M. Rakhanda A.S	Taekwondo	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
28	Celine Kakauhe (Pi)	Pencak Silat	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
29	Wais Alqory	Pencak Silat	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
30	Maulana Alfansari	Pencak Silat	Perak	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019

31	Yuni Maharani M. (Pi)	Pencak Silat	Perak	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
32	Muhammad Al Qodri	Pencak Silat	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
33	Fadel M Ardan	Debate	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
34	Moammar Haq Albadri	Debate	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
35	Zeky Ardiansyah	Debate	Emas	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
36	M. Jody Billia Pratama	Sinematografi	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
37	Ari Putra Pradana	Sinematografi	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
38	Andi Alfian Salehudin	Sinematografi	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
39	Moh. Fahri Wahyu A.	Sinematografi	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
40	Bella Friska Ali	Sinematografi	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019
41	Puja Ayuni Bestary	Sinematografi	Perunggu	Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Se Indonesia XI Tahun 2019

42	Haris Silooy Yanuar	Beatbox	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
43	Achmad. H. Oka	Beatbox	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
44	Johannes Samuel Awak	Beatbox	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
45	Reza Antara Baskoro	Fotografi	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
46	Ari Putra Pradana	Fotografi	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
47	Emza Fansuri Qinan	Fotografi	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
48	Mohammad Fahri Wahyu	Short Movie	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
49	Andi Alvian S.	Short Movie	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
50	M. Jody B. Pratama	Short Movie	Emas	Festival Seni Nusantara Antar Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Indonesia Tahun 2019
51	Thadeus Frits Fautngiljanan	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal "Meseo Cup 2022"
52	Yanechson Gwarry Kogoya	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal "Meseo Cup 2022"

53	M. Rivai Faruk	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
54	Gema Kristo Wospakrik	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
55	Rifansyah Syahroen Nahar Laitupa	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
56	Ahmad Dzulfikardin	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
57	Davano Gerwin Dias	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
58	Andi Wirayanta Bayu Tirta	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
59	Alessandro Jhon Moay	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
60	Fedo Arliansyah	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
61	Ardyan Rizal Zakaria	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
62	Muhammad Andika	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
63	Pahmi Sa’ban	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
64	Alfandi Rafanero	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”
65	Geoffrey Aaron Manuhua	Futsal	Juara II	Pertandingan Futsal “Meseo Cup 2022”

3.1.5 Alumni

Alumni pendidikan Sarjana Terapan IPDN ditempatkan sebagai ASN di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saat ini, sekitar 85% - 100% lulusan setiap tahunnya ditempatkan pada perangkat daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sisanya, yaitu 0% - 15% ditempatkan pada instansi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Pada tahun 2022, jumlah alumni IPDN program Sarjana Terapan telah mencapai 28.144 orang, dengan rincian penugasan sebagai berikut:

No	Provinsi	Jumlah Alumni
1	Jawa Tengah	2.294
2	Jawa Timur	2.202
3	Jawa Barat	2.122
4	Sulawesi Selatan	1.926
5	Sumatera Utara	1.705
6	Papua	1.703
7	Aceh	1.242
8	Sumatera Barat	1.079
9	Nusa Tenggara Timur	939
10	Sumatera Selatan	879
11	Kalimantan Barat	820
12	Sulawesi Utara	774
13	Maluku	755
14	Sulawesi Tenggara	705
15	Kalimantan Timur	694
16	Nusa Tenggara Barat	694
17	Lampung	688
18	Jambi	665
19	Kalimantan Selatan	665
20	Bali	661
21	Kalimantan Tengah	585
22	Sulawesi Tengah	583
23	D.K.I. Jakarta	557

24	Papua Barat	500
25	Bengkulu	475
26	Maluku Utara	434
27	Banten	377
28	Kepulauan Riau	345
29	Kep. Bangka Belitung	287
30	D.I. Yogyakarta	258
31	Gorontalo	247
32	Sulawesi Barat	229
33	Kalimantan Utara	55
Total		28.144

Masyarakat secara umum juga memberikan kepercayaan yang tinggi pada alumni IPDN. Terdapat cukup banyak alumni IPDN yang telah berhasil terpilih menjadi kepala daerah, antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kabupaten/kota	Provinsi
1	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau	Riau	Riau
2	Dr. H. Idris Rahim, MM	Wakil Gubernur Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
3	Drs. Raidin Pinim, M.AP	Bupati Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	Aceh
4	Azwir, S.Sos	Bupati Aceh Selatan	Aceh Selatan	Aceh
5	Drs. Shabela Abubakar	Bupati Aceh Tengah	Aceh Tengah	Aceh
6	T. Irfan Tb	Bupati Aceh Jaya	Aceh Jaya	Aceh
7	Drs. Salmaza, MAP	Wakil Walikota Subulussalam	Kota Subulussalam	Aceh
8	Drs. Suradji Junus	Wakil Walikota Sabang	Kota Sabang	Aceh

9	Andar Amin Harahap, S.Stp., M.Si.	Bupati Padang Lawas Utara	Padang Lawas Utara	Sumut
10	Dr. Genius Umar, S.Sos., M.Si.	Walikota Pariaman	Kota Pariaman	Sumbar
11	H. Suyatno, AMP	Bupati Rokan Hilir	Rokan Hilir	Riau
12	Drs. Irwan Nasir, M.Si	Bupati Kepulauan Meranti	Kepulauan Meranti	Riau
13	Drs. H. Alfedri, M.Si.	Bupati Siak	Siak	Riau
14	Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si	Bupati Karimun	Karimun	Kepri
15	Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si.	Bupati Natuna	Natuna	Kepri
16	H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, M.H.	Bupati Lampung Utara	Lampung Utara	Lampung
17	Syamsul Auliya Rahman. S.STP, M.Si	Wakil Bupati Cilacap	Cilacap	Jateng
18	Drs. H. Rijanto, Mm	Bupati Blitar	Blitar	Jatim
19	Drs H. Indartato, Mm	Bupati Pacitan	Pacitan	Jatim
20	Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si	Bupati Sikka	Sikka	NTT
21	Drs. H. Irwan, M.Si	Wakil Walikota Singkawang	Singkawang	Kalbar
22	Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si.	Bupati Paser	Paser	Kaltim
23	Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, M.Si	Bupati Malinau	Malinau	Kaltara

24	Drs. Perdie, M.Si	Bupati Murung Raya	Murung Raya	Kalteng
25	Riko Purwanto, S.STP	Wakil Bupati Lamandau	Lamandau	Kalteng
26	Drs. H. M. Arifin Arpan, MM	Bupati Tapin	Tapin	Kalsel
27	Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si.	Bupati Kolaka Timur	Kolaka Timur	Sultra
28	Drs. La Bakry M.Si	Bupati Buton	Buton	Sultra
29	Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si	Bupati Bantaeng	Bantaeng	Sulsel
30	Dr. Benhur Tomi Mano, Mm	Walikota Jayapura	Kota Jayapura	Papua
31	Dr. Wahyu Meganthara, M.Si	Walikota Jakarta Pusat	Kota Adm. Jakarta Pusat	DKI
32	Drs. H. Husein Murad, M.Si.	Bupati Adm. Kepulauan Seribu	Adm. Kepulauan Seribu	DKI
33	Sigit Wijatmoko, Ap, M.Si	Walikota Jakarta Utara	Kota Adm. Jakarta Utara	DKI
34	Ali Maulana Hakim S.IP, M.Si	Wakil Walikota Jakarta Utara	Kota Adm. Jakarta Utara	DKI
35	Uus Kuswanto, S.Sos, M.AP	Wakil Walikota Jakarta Timur	Kota Adm. Jakarta Timur	DKI
36	Drs. Isnawa Adji, MAP	Wakil Walikota Jakarta Selatan	Kota Adm. Jakarta Selatan	DKI
37	Drs. H. Zardewan, MM	Wakil Bupati Pelalawan	Pelalawan	Riau
38	Drs.H. Mahmud Abdullah	Wakil Bupati Sumbawa	Sumbawa	NTB

39	H Rudy Resnawan	Wakil Gubernur Kalimantan Selatan		Kalsel
40	H. Anang Syakhfiani	Bupati Tabalong	Tabalong	Kalsel
41	H. Sukamta	Bupati Tanah Laut	Tanah Laut	Kalsel
42	Drs. H. Achmad Fikry, M. AP	Bupati Hulu Sungai Selatan	Hulu Sungai Selatan	Kalsel
43	Drs. H. Alimin, M.Si	Wakil Bupati Pinrang	Pinrang	Sulsel
44	Kombes Pol (purn) M. Rais Adam	Bupati Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Sulteng
45	Isdianto S.Sos MM	Gubernur Kepulauan Riau		Kepri

Selain itu, terdapat banyak alumni IPDN yang telah menduduki jabatan puncak dalam karir birokrasi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri
2	Dr. Rahman Hadi, M.Si	Sekretaris Jenderal Dpd Ri	Setjen DPD
3	Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, Ap, M.Si	Sekretaris Jenderal Ombudsman Ri	Ombudsman
4	Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Ri	KPU
5	Drs. Akmal Malik, M.Si	Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri
6	Drs. Robert Simbolon, MPA	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Pada Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri
7	Dr. Drs. Yusharto H, M.Pd	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri

8	Dr. Safrizal Za, M.Si	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri	Kemendagri
9	Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.	Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri	Kemendagri
10	Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri	Kemendagri
11	Drs. H. Jufri Rahman, M.Si.	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Dan Pengawasan/Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah	KEMENPANR B
12	Lalu Niqman Zahir, S.Sos, M.Si	Deputi Administrasi Dpd Ri	DPD
13	Prof. Muchlis Hamdi., Mpa., Ph.D	Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan	Kemendagri
14	Dra. Rahajeng Purwianti, M.Si	Kepala Biro Kepegawaian Pada Sekretariat Jenderal	Kemendagri
15	Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M.	Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal	Kemendagri
16	Dra. Marisi Parulian, M.Si	Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Kemendagri
17	Asmawa, Ap., M.Si	Kepala Pusat Data Dan Sistem Informasi Pada Sekretariat Jenderal	Kemendagri
18	Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.	Kepala Pusat Penerangan Pada Sekretariat Jenderal	Kemendagri
19	Drs. Indra Baskoro, M.Si	Sekretaris Inspektorat Jenderal Pada Inspektorat Jenderal	Kemendagri
20	Dr. Elfin Elyas, S.Sos, M.Si	Inspektur Iii Pada Inspektorat Jenderal	Kemendagri
21	Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM	Inspektur Khusus Pada Inspektorat Jenderal	Kemendagri
22	Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si	Direktur Politik Dalam Negeri Pada Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	Kemendagri

23	Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si	Direktur Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
24	Dr. R.M. Arief Moelia Edie, M.Si	Kepala Biro Administrasi Kerjasama Dan Hukum Ipdn	
25	Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si	Direktur Kawasan, Perkotaan Dan Batas Negara Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
26	Drs. Andi Bataralifu, M.Si	Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus, Dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Kemendagri
27	Drs. Benni Irwan, M.Si, Ma.	Direktur Fasilitasi Keuangan Dan Aset Pemerintahan Desa Pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Kemendagri
28	Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si	Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Kemendagri
29	Bahri, S.STP, M.Si	Direktur Pelaksanaan & Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Kemendagri
30	Dr. Hendriwan, M.Si	Direktur Pendapatan Daerah Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Kemendagri
31	Drs. MATHEOS TAN, MM	Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan	Kemendagri
32	Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan Dan Manajemen Kepemimpinan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kemendagri
33	Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME	Direktur Fasilitasi Kelembagaan Dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah	Kemendagri

34	Bisri, S.Sos, M.Si	Kepala Biro Administrasi Umum Dan Keuangan Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Kemendagri
35	Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pada Sekretariat Jenderal	Kemendagri
36	Drs. Baharuddin Pabba, M.Si	Kepala Biro Administrasi Keprajaan Dan Alumni Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Kemendagri
37	Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf, M.Si	Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Bnpp
38	Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si	Sekretaris Dkpp	Dkpp
39	Dr. Drs. Amran, AP, M.T	Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis	Ombudsman
40	Bambang Dwi Anggono, S.Sos, M.Eng	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika	Kominfo
41	H. Muhammad Hatta, S.STP, Mm	Direktur Pupuk Dan Pestisida Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian	Kementan
42	Sugito, S.Sos, Mh	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Kemendes PDTT
43	Drs. Syahrul, M.Si	Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transimgrasi	Kemendes PDTT
44	Drs. H. Luthfy Latief, M.Si	Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transimgrasi	Kemendes PDTT

45	Hasrul Edyar, S.Sos, M.Ap	Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Kemendes PDTT
46	Agus Kuncoro, S.Sos, M.Si	Direktur Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Kemendes PDTT
47	Rafdinal, S.Sos, M.Tp	Direktur Perencanaan Dan Identifikasi Daerah Tertinggal Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Kemendes PDTT
48	Dr. Dwi Rudi Hartoyo, S.Sos, M.Si	Direktur Pengembangan Sumber Daya Dan Lingkungan Hidup Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Kemendes PDTT
49	M. Fachry L. S.STP, M.Si	Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.	Kemendes PDTT
50	Drs. H. Muklis, M.Si	Direktur Sarana Dan Prasarana Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.	Kemendes PDTT
51	Drs. Nirwan Ahmad Helmi, M.M	Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi Pada Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Kemendes PDTT

52	Drs. Mulyadin Malik, M.Si	Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Kemendes PDDT
53	Drs. Elvandary, M.Si	INSPEKTUR III Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Kemendes PDDT
54	Dra. Erlin Chaerlinatun M	Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Kemendes PDDT
55	Hotman	Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Kemensos
56	Iip Ilham Firman	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN, Dan Netralitas ASN	KASN
57	Drs. Reza Fahlevi, M.Si	Direktur Kelembagaan, Deputi Bidang Sumber Daya Dan Kelembagaan	Kemenparekraf
58	Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si.	Karo Organisasi, Keanggotaan Dan Kepegawaian Setjen	SET DPD RI
59	Dr. Rahman Hadi, M.Si.	Karo Umum Setjen Dpd	Set DPD RI
60	Dr. Fitriani, Ap., M.Si.	Kepala Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran	SET DPD RI
61	Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., M.Si.	Plt. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan	Set DPD RI
62	Dr. Andi Abubakar, Ap, M.Si	Asisten Kasn Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 2	KASN
63	Irwansyah	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik Dan	KASN

		Kode Perilaku ASN, Dan Netralitas ASN	
64	Nurhasni	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN, Dan Netralitas ASN	KASN
65	H. John Ferianto, S.Sos. Mm	Asisten Kasn Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1	KASB
66	Murtono, S.Stp, M.Si	Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara	BNPP
67	Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si	Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	BNPP
68	Drs. Dewa Made Indra, M.Si	Sekretaris Daerah Provinsi Bali	Prov. Bali
69	Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara	Prov. Maluku Utara
70	T.S. Arif Fadillah	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri
71	M. Ikhsan Ahyat, S.STP, Map	Sekretaris Daerah Aceh Timur	Pemkab. Aceh Timur
72	Drs. H. ABD. RAHMAN, SE, MM	Sekretaris Daerah Pidie Jaya	Pemkab. Pidie Jaya
73	Syahrul Thaib, SH, MAP	Sekretaris Daerah Kota Langsa	Kota Langsa
74	Drs. ZAKARIA, MM	Sekretaris Daerah Kota Sabang	Kota Sabang
75	Drs. Iskandar, M.Si	Sekretaris Daerah Aceh Besar	Pemkab. Aceh Besar
76	Darwin Zein, S.Sos, M.Si	Sekda Deli Serdang	Pemkab. Deling Serdang

77	M. Faisal Hasrimy, AP, MAP	Sekda Serdang Bedagai	Pemkab. Serdang Bedagai
78	Muh. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, MAP	Sekda Kota Binjai	Pemkab. Kota Binjai
79	Adlisman	Sekda Dharmasraya	Pemkab. Dharmasraya
80	Drs. MARA ONDAK	Sekda Pasaman	Pemkab. Pasaman
81	Yudesri, S.Ip, M.Si	Sekda Pasaman Barat	Pemkab. Pasaman Barat
82	Irwandi, M.Si	Sekda Tanah Datar	Pemkab. Tanah Datar
83	Rusdianto	Sekda Kota Solok	Kota Solok
84	Sony Budaya Putra, Ap, M.Si	Sekda Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
85	Drs. Yusri, M.Si	Sekda Kampar	Pemkab. Kampar
86	Drs. Tengku Mukhlis, M.Si	Sekda Pelalawan	Pemkab. Pelalawan
87	H. Job Kurniawan, AP, M.Si	Pj. Sekda Rokan Hilir	Pemkab. Rokan Hilir
88	H.M. Noer Mbs	Sekda Pekanbaru	Kota Pekanbaru
89	Drs. Muhd. Firmansyah, M.Si	Sekda Karimun	Pemkab. Karimun
90	Sapril, S.IP	Sekda Tanjung Jabung Timur	Pemkab. Tanjung Jabung Timur
91	Drs. Teguh Arhadi, Mm	Sekda Tebo	Pemkab. Tebo
92	Drs. H. Tohar, MM	Sekretaris Daerah Panajam Paser Utara	Pemkab. Panajam Paser Utara
93	Drs. H. Sunggono	Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara	Pemkab. Kutai Kartanegara

94	Drs. Katsul Wijaya, M.Si.	Sekretaris Daerah Paser	Pemkab. Paser
95	Dr. H. Sugeng Chairuddin, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda
96	Drs. Yacob Tullur, MM	Sekretaris Daerah Kutai Barat	Pemkab. Kutai Barat
97	Sayid Mn Fadli	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
98	Edy Purwanto, AP, M.Si	Sekretaris Daerah Barito Selatan	Pemkab. Barito Selatan
99	Agus Mulyadi	Sekretaris Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon
100	Sodiq Tri Widiyanto	Sekretaris Daerah Ngawi	Pemkab. Ngawi
101	Drs. One Andang Wardoyo M.Si	Sekretaris Daerah Wonosobo	Pemkab. Wonosobo
102	Hera Nugrahayu	Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya	Kota Palangkaraya
103	Ardiansyah	Sekretaris Daerah Mamasa	Pemkab. Mamasa
104	H. TS Arif Fadilah	Sekretaris Daerah Provinsi Kepri	Pemprov. Kepri
105	Teguh Ahmad Syafari	Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang
106	Eric PZ Lumbun	Sekretaris Daerah Kab Adm. Kepulauan Seribu	Adm. Kepulauan Seribu
107	Iwan Asaad AP. M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pare Pare	Pemkab. Parepare
108	Sudirman Bungi	Sekretaris Daerah Sidrap	Pemkab. Sidrap
109	Francisco Adi Lalo	Sekretaris Daerah Sumba Barat Daya	Pemkab. Sumbar Barat Daya
110	David Lalandos	Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara	Pemkab. Minahasa Tenggara

111	Audy Pengemaman	Sekretaris Daerah Kota Bitung	Kota Bitung
112	Drs. Septedy, M.Si	Sekretaris Daerah Kab Kapuas	Pemkab. Kapuas

Selain itu, terdapat dua alumni IPDN yang terpilih menjadi anggota legislatif, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Anwar Hafid	Anggota DPR RI
2	Deny Febrian Roza, S.STP	Ketua DPRK Aceh Tenggara

Hasil Survey Kepuasan *Stakeholder* terhadap Alumni IPDN yang dilaksanakan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa alumni IPDN umumnya menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan pada aspek Komunikasi, *Organizational Skill*, *Leadership*, *Logic*, *Effort*, *Group Skill*, dan Etika.

Selanjutnya, Program Studi Magister yang dimulai sejak Tahun 2001 telah memiliki 2.214 alumni. Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan yang dimulai sejak Tahun 2013 telah memiliki 181 alumni. Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan yang dimulai sejak tahun 2012 telah memiliki 339 alumni. Terdapat beberapa alumni prodi Doktor dan Magister IPDN yang menjadi Menteri, Kepala Daerah maupun anggota legislatif.

3.2 Bidang Penelitian

Penelitian IPDN terbagi menjadi Penelitian Dasar, Terapan dan Pengembangan berskala Kecil, Menengah dan Besar dengan sistem Mandiri, Kelompok dan Unggulan. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di IPDN dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah menghasilkan 137 laporan hasil penelitian dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian tahun 2020 berjumlah 57 laporan penelitian meliputi:
 - a. Kampus Jatinangor:
 - Penelitian Mandiri : 15 Laporan Hasil Penelitian
 - Penelitian Kelompok : 7 Laporan Hasil Penelitian
 - Penelitian Unggulan : 5 Laporan Hasil Penelitian
 - b. Kampus Daerah:
 - Penelitian Mandiri : 10 Laporan Hasil Penelitian

- Penelitian Kelompok : 20 Laporan Hasil Penelitian
2. Penelitian tahun 2021 berjumlah 57 laporan penelitian meliputi:
 - a. Kampus Jatinangor:
 - Penelitian Mandiri : 8 Laporan Hasil Penelitian
 - Penelitian Kelompok : 12 Laporan Hasil Penelitian
 - Penelitian Unggulan : 10 Laporan Hasil Penelitian
 - b. Kampus Jakarta:
 - Penelitian Mandiri : 2 Laporan Hasil Penelitian
 - Penelitian Kelompok : 2 Laporan Hasil Penelitian
 - c. Kampus Daerah:
 - Penelitian Mandiri : 7 Laporan Hasil Penelitian
 - Penelitian Kelompok : 16 Laporan Hasil Penelitian
 3. Penelitian tahun 2022 berjumlah 23 laporan penelitian meliputi:
 - a. Kampus Jatinangor:
 - Penelitian Kelompok : 17 Laporan Hasil Penelitian
 - b. Kampus Daerah:
 - Penelitian Kelompok : 6 Laporan Hasil Penelitian



Seminar Hasil Penelitian dan Kajian Dosen IPDN

Publikasi penelitian dosen IPDN telah diindeks pada berbagai database, dan disitasi sebagai rujukan ilmiah berbagai penelitian lainnya. Jumlah dan kategori publikasi dosen IPDN adalah sebagai berikut:

Jumlah Publikasi Jurnal Ilmiah Dosen IPDN

Naskah berdasarkan Indeksasi				
Indikator	<i>Scopus</i>	<i>Google Scholar</i>	<i>Web of Science</i>	Garuda
Publikasi	63	3.343	5	174
Sitasi	173	14.335	47	3
Naskah Disitasi	29	1.106	3	3
Jumlah	322	18.784	55	180

Publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dari dosen IPDN adalah sejumlah 63 naskah, dengan rincian peringkat sebagaimana gambar berikut:



3.3 Bidang Pengabdian Masyarakat

Setiap tahun, dosen dan praja IPDN rutin melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengabdian Masyarakat Tahun 2020

1. Lokakarya/Pelatihan Penyusunan Proposal PK M dan Penulisan Artikel Jurnal Pengabdian
2. Kegiatan pengabdian di 6 Lokasi Kabupaten (Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran)
3. Pengabdian Masyarakat Desa Binaan Berbasis Prodi dilaksanakan di 4 Desa (Cilayung, Cileles, Hegarmanah, Cibeusi) Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan rekomendasi untuk keempat Desa di Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi Kerakyatan, dan Bidang Pembangunan.



Kegiatan Desa Binaan Interdisipliner PKM Kab. Sumedang

b. Pengabdian Masyarakat Tahun 2021

1. Lokakarya/Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian dan Penulisan Artikel Jurnal;
2. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset dan Kajian di 3 Kabupaten (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pandeglang) dan Kota Cimahi di Bidang Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi Kerakyatan, dan Bidang Pembangunan;
3. Pengabdian Desa Binaan Berbasis Prodi dilaksanakan di 4 Desa (Cilayung, Cileles, Hegarmanah, Cibeusi) Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang), di Bidang Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi Kerakyatan, dan Bidang Pembangunan;
4. Pelaksanaan Gebyar Vaksinasi *Covid-19* Kerja Sama IPDN bersama TNI AL Tahun 2021, telah memberikan vaksin kepada masyarakat sejumlah 16.658 orang. Vaksinasi dilaksanakan di Kabupaten Sumedang di 3 Kecamatan (Jatinangor, Sukasari dan Tanjungsari) dengan jumlah masyarakat ter vaksin sebanyak 12.279 orang, dan di Provinsi Papua di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura dengan jumlah masyarakat ter vaksin sebanyak 4.379 orang;



Pelaksanaan Gebyar Vaksin oleh IPDN dengan TNI-AL dan Relawan COVID-19

c. Pengabdian Masyarakat Tahun 2022

1. Kerja Sama IPDN bersama TNI AL dan Relawan Lawan Covid-19 dengan Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Gowa, Kabupaten Bantaeng dan IKAPTK di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Percepatan Vaksinasi *Booster* Tahun 2022, dengan jumlah masyarakat tervaksin sebanyak 20.050 orang;



Pelaksanaan vaksinasi oleh IPDN bersama TNI AL

2. Lokakarya/Pelatihan Penyusunan Proposal pengabdian dan Penulisan Artikel Jurnal pengabdian;
3. Pengabdian Masyarakat Desa Binaan Berbasis Interdisipliner pada 4 Desa (Desa Cipancar, Desa Cikujang, Desa Ponggang, dan Desa Cintamekar) Kec. Serangpanjang Kab. Subang, dengan kegiatan PKM di Bidang Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi Kerakyatan, dan Bidang Pembangunan;

4. Pengabdian Masyarakat Desa Binaan Berbasis Prodi dilaksanakan di 12 Desa (Desa Cibeusi, Desa Cipacing, Desa Mekargalih, Desa Sayang, Desa Cikeruh, Desa Jatimukti, Desa Cisempur, Desa Cintamulya, Desa Jatiroke, Desa Cileles, Desa Cilayung dan Desa Hegarmanah) Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dan di Kabupaten Sumedang, dengan kegiatan PKM di Bidang Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi Kerakyatan, dan Bidang Pembangunan;
5. Kerja Sama IPDN-ILO dalam Seminar Lokakarya Nasional “Memadukan Ekosistem Pemerintahan dan Perburuhan ke dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat” dengan Narasumber Sekjen Kemnaker, Staf Khusus BUMN, Serikat Pekerja / Buruh (Sekjen KSBSI) diikuti oleh para Dosen IPDN dan pejabat IPDN;
6. Kegiatan Bhakti Karya Praja (BKP) bagi Praja Utama Angkatan XXX Tahun Akademik 2022/2023 di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.



Kegiatan Bhakti Karya Praja Bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXX

BAGIAN IV

STANDAR PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

4.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IPDN diatur dengan Keputusan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 sebagai penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal perguruan tinggi. SPMI bertujuan menjamin tercapainya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan IPDN dan melampaui standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan budaya mutu akademik

Penetapan SPMI mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, yang kemudian ditambahkan dengan beberapa standar lampauan yang menjadi ciri khas IPDN, sebagai berikut:

1. Standar pengajaran;
2. Standar pelatihan;
3. Standar pengasuhan;
4. Standar penelitian;
5. Standar pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar layanan kemahasiswaan/keprajaan;
7. Standar kerja sama; dan
8. Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran.
9. Standar pelatihan;
10. Standar pengasuhan.



Rapat Persiapan Akreditasi Institusi

Penjaminan mutu di IPDN dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Pengevaluasian Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar (PPEPP) dari SPMI. Siklus kegiatan ini terdiri dari:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IPDN yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran.
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IPDN merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran.
3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IPDN merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IPDN merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IPDN merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

4.2 Akreditasi

Peringkat akreditasi program studi di IPDN saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Program	Program Studi	Status dan Peringkat Akreditasi	Nomor dan Tanggal	Tanggal Kadaluarsa
1	2	3	4	5	6
1	S3	Ilmu Pemerintahan (S3)	B	4517/SKJBAN-PT/Akred/D/XII2017	11/28/2017
2	S2	Magister Terapan Studi Pemerintahan - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (65102 - 342001)	B	814/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019	04/09/2019
3	D4/ Terapan	Administrasi Pemerintah Daerah - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (65302 - 342001)	Baik	10648/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2021	07/09/2021
4	D4/ Terapan	Keuangan Publik - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (61306 - 342001)	Baik	1624/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021	23/03/2021

5	D4/ Terapan	Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (62410 - 342001)	Baik	11525/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2021	10/12/2021
6	D4/ Terapan	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (61302 - 342001)	Baik	337/SK/BAN-PT/Akred/ST/I/2021	06/01/2021
7	D4/ Terapan	Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (60301 - 342001)	Baik	2677/SK/BAN-PT/Akred/ST/V/2021	05/04/2021
8	D4/ Terapan	Politik Indonesia Terapan - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (72302 - 342001)	Baik	2034/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2021	13/04/2021
9	D4/ Terapan	Praktik Perpolisian Tata Pamong - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (55222 - 342001)	Baik	1663/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/II/2022	03/08/2022
10	D4/ Terapan	Studi Kebijakan Publik - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (63302 - 342001)	Baik	10645/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2021	07/09/2021
11	D4/ Terapan	Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (63313 - 342001)	Baik	10013/SK/BAN-PT/Akred/ST/VIII/2021	04/08/2021
12	D4/ Terapan	Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (55303 - 342001)	Baik	11993/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/X/2021	10/05/2022

BAGIAN V

SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana IPDN di kampus pusat Jatinangor dan Jakarta maupun di kampus daerah secara umum sudah cukup memadai. Berbagai fasilitas telah tersedia, antara lain ruang kelas, ruang kantor, perpustakaan, laboratorium, poliklinik, tempat berolahraga, ruang kesenian, ruang kegiatan praja, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang teknologi informasi, ruang makan praja, ruang laundry dan makan praja serta ruang fasilitas umum. Demikian juga tersedia peralatan olahraga, musik dan seni serta drumband yang dapat digunakan oleh praja.

Luas dan jumlah ruang kuliah sudah mencukupi untuk kegiatan proses belajar mengajar atau kegiatan akademik lainnya. Setiap ruang kuliah telah tersedia LCD, bangku kuliah, *whiteboard*, *smartboard*, meja dosen, pengeras suara (*wireless*) dan semua dalam kondisi baik sehingga kenyamanan selama proses belajar dapat terjaga.

Jaringan internet tersedia di seluruh lokai kampus. Perlengkapan CCTV tersedia pada wilayah kelas sebagai sarana kontrol bagi pimpinan maupun bagi dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya, perpustakaan IPDN sudah sangat memadai dengan ketersediaan bahan bacaan yang aktual termasuk juga e-book dan sarana prasarana lain yang dapat dipergunakan dalam mengakses dan bahan-bahan yang diperlukan peserta didik dan dosen serta unsur lainnya sehingga mampu mendongkrak minat baca Praja dengan memanfaatkan akses *E-Library* sehingga praja dengan mudah mencari buku-buku referensi, juga pembelajaran jarak jauh dengan *E-Learning* ke kampus-kampus daerah dengan *Ruang Video Conference* di Lantai dua perpustakaan IPDN. Begitu juga pada tiap fakultas disediakan perpustakaan khusus sehingga ruang dan peluang dalam mencari informasi sudah cukup tersedia.

5.1 Sarana dan Prasarana di IPDN Jatinangor



Gerbang Utama IPDN



Gedung Utama - Depan



Gedung Utama - Belakang



Gedung Pascasarjana



Balairung Rudini



Graha Wyata Praja



Ruang VIP



Perpustakaan



Menza



Gedung Angkutan



Gedung Laundry



Wisma Praja



Pura Praja Natha



Masjid Darul Ma'arif



Gereja Protestan Imanuel



Gereja Katolik St. Albertus Magnus



Gedung Kolam Renang



Laboratorium Adminduk



Laboratorium Komputer



**Laboratorium Teknologi Rekayasa
Informasi Pemerintahan**



Laboratorium Pemerintahan



Lapangan Sepak Bola



Lapangan Voli & Basket

BAGIAN VI

KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

6.1 Kerja Sama Dalam Negeri

IPDN melakukan kerja Sama dengan berbagai lembaga dalam negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah kerja sama IPDN dengan Bank Negara Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah Academy (BUMD) Prov. DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Universitas Komputer Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, Universitas Islam Riau, Universitas Ngurah Rai, Universitas Nusa Bangsa, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung, Universitas Pramita Indonesia, Universitas Tanjungpura, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Padang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Musamus, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Manado, Universitas Sam Ratulangi, dan lain-lain. Kerja sama IPDN dengan Bank Negara Indonesia dilakukan untuk mendukung penyediaan jasa layanan perbankan di Lingkungan IPDN. Selanjutnya kerja sama IPDN dengan BUMD Academy Prov. DKI Jakarta dilakukan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana Laboratorium Keuangan Publik dan *Command Center* di IPDN. Dalam pelaksanaan Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Praja bagi Calon Praja Pratama Angkatan XXXIII IPDN Tahun 2022, IPDN menyelenggarakan kerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

6.2 Kerja Sama Luar Negeri

IPDN juga melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga luar negeri diantaranya adalah kerja sama IPDN dengan *International Labour Organization* (ILO), Universitas Kebangsaan Malaysia, dan lain-lain. Kerja Sama IPDN dengan ILO bertujuan untuk meningkatkan pemahaman isu ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan Praja/mahasiswa. Realisasi kerja sama ini adalah terlaksananya kegiatan Stadium General dengan tema Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap Pasar Kerja bagi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Praja/Mahasiswa oleh Direktur ILO. Kegiatan lain yang dilakukan oleh IPDN dengan ILO adalah *Training on Labour and Employment Issues* for IPDN Lecturers dan Seminar Lokakarya “Memadukan Ekosistem Pemerintahan dan Perburuhan ke dalam Program Pengabdian Masyarakat.”



Kerja Sama IPDN dengan PT. Sekar Tri Upaya



Kerja Sama IPDN dengan BUMD Academy
Prov. DKI Jakarta



Kerja Sama IPDN dengan Bank Negara
Indonesia



Kerja Sama IPDN dengan Kepolisian Daerah
Jawa Barat



Pembukaan Kerja Sama IPDN dengan International Labour
Organization (ILO)

BAGIAN VII

KEGIATAN PRAKTISI DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS PRAJA DAN CIVITAS AKADEMIKA

7.1 Stadium General/Kuliah Umum

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praja dan civitas akademika pada isu-isu aktual dan perkembangan kebijakan pemerintahan yang terbaru, IPDN melaksanakan stadium general atau kuliah umum dengan mengundang tokoh nasional maupun daerah yang berprestasi serta mampu memberikan wawasan luas. Stadium general diikuti oleh seluruh dosen, pejabat struktural dan para praja di kampus pusat dan kampus daerah. Materi disampaikan secara hybrid, yaitu kombinasi luring bagi peserta di Jatinangor dan daring bagi peserta dari kampus daerah.

Daftar stadium general yang dilaksanakan selama tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut.

22 Juli 2020

Peran Pemimpin Visioner untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dalam Rangka Ketahanan Nasional Oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komjen. POL. Drs. Firly Bahuri, M.Si



23 Juli 2020

Peran Alumni IPDN Menegakkan Kebijakan Pemerinta di Masa Pandemi *Covid-19* Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (H.C) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd



19 April 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Strategi - Penanganan Covid-19 Oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Semarang, H. Hendrar Prihadi, SE., MM

Strategi Pemenangan Pilkada dan Implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Oleh Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum; Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.; dan Bupati Minahasa Utara, Joune J. Ganda, S.E.



23 Februari 2022

Peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Upaya Pemantapan Stabilitas Nasional Dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Oleh Gubernur Jawa Barat, Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D

Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Upaya Pemantapan Stabilitas Dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, S.E

Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Upaya Pemantapan Stabilitas Dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, SH, MM



21 Juli 2022

Profesionalitas ASN Lulusan IPDN Dalam Percepatan Pembangunan Nasional Serta Upaya Menghadapi Tantangan Globalisasi Oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo, SH, MH



30 Maret 2022

Penguatan Stabilitas Politik Hukum dan Keamanan Dalam Negeri Oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P.



31 Maret 2022

Optimalisasi Badan Intelijen Negara dalam Melakukan Deteksi Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial dan Keamanan Nasional Oleh Ketua Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Muhammad Munir mewakili Kepala Badan Intelijen Negara

Penguatan Ketahanan Nasional Melalui Upaya Pemantapan Stabilitas Nasional dan Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Oleh Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, S.H., M.H.



1 November 2022

Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Nasional Oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, MM



10 Oktober 2022

Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah
Oleh Bupati Tulang Bawang, Dr. Hj. Winarti, SE, MH; Plt. Walikota Semarang, Ir. Hj. Heverita Gunaryanti Rahayu, M.Sos



26 Januari 2022

Leadership Alignment Session Melalui Penguatan Mental dan Spiritual Kita Mantapkan jati Diri ASN dan Praja yang Lebih Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak
Oleh Ustadz Dr. Das'ad Latif



24 Februari 2022

Upaya dan Inovasi Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka; Bupati Batubara, Ir.H. Zahir, M.A.P; Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Nelson Pamolinggo, M.Pd; Walikota Makassar, R. H. Mohammad Ramdhan Pomanto,



07 April 2022

Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanudin, S.H., M.M., M.H.



27 Juni 2022

Antisipasi Gerakan Radikalisme dan Intoleran Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Oleh Zannuba Arifah Chafsoh Rahman Wahid

Strategi Mengatasi Gerakan Radikalisme Oleh Komandan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Irjenpol. Marthinus Hukom, S.I.K, M.Si



7.2 Seminar Strategis

IPDN turut berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan pemerintah dengan cara melaksanakan seminar strategis untuk membedah isu dan persoalan publik yang sedang terjadi, untuk kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah. Selama dua tahun terakhir, IPDN telah melaksanakan Seminar Strategis Pilkada Langsung pada tahun 2020, dan Seminar Strategis Otonomi Khusus Papua. Kegiatan seminar strategis juga disertai dengan Focused Group Discussion untuk membedah persoalan aktual yang sedang terjadi dan merumuskan rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk pemecahan masalah.



Seminar Nasional Pilkada Serentak

7.3 Kerja Sama

IPDN menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Kerja sama dilakukan dengan prinsip saling memberi manfaat bagi para pihak yang terlibat.

BAGIAN VIII

PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN RENOVASI

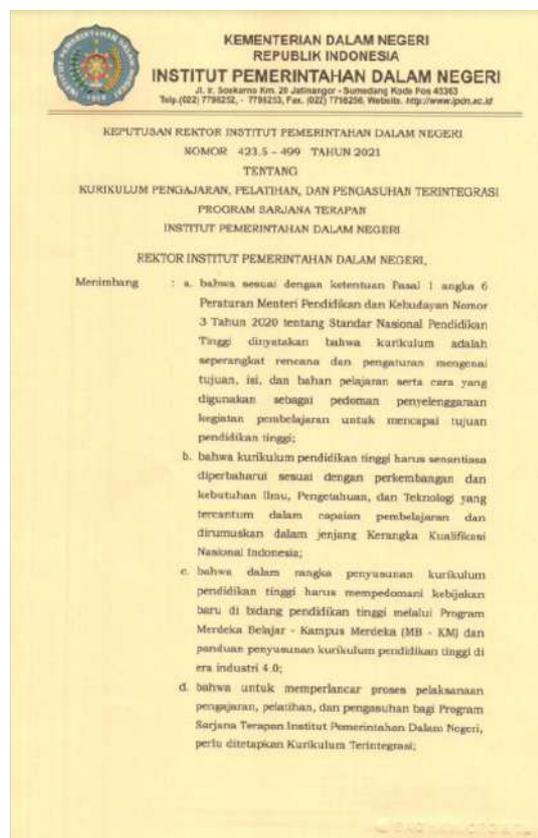
8.1 Penataan

8.1.1 Penataan Bidang Pendidikan

a. Penataan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Terintegrasi

Secara klasifikasi keilmuan, kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (Jarlatsuh) terintegrasi di IPDN disusun dengan mengacu pada *Body of Knowledge* Terapan Keilmuan Pemerintahan. Selanjutnya, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Tugas Praja (RTP) Kurikulum Jarlatsuh Terintegrasi berdasarkan masing-masing Program Studi.

IPDN merupakan satu-satunya perguruan tinggi kedinasan yang mengintegrasikan pengasuhan berupa penanaman, penumbuhan, pengembangan dan pendewasaan kepribadian serta karakter kepamongprajaan secara terintegrasi pada kurikulum. kegiatan pengasuhan disinkronkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indeks Prestasi Kumulatif Praja.



Surat Keputusan Rektor IPDN tentang Kurikulum Jarlatsuh Terintegrasi

b. Penataan Bidang Vokasi, Bidang Akademik, Bidang Profesi

1. Penataan Bidang Vokasi

- Penataan Kurikulum Jarlatsuh Terintegrasi;
- Penataan *Home Base* dan *Activity Base Dosen*;
- Penerapan *Smart Campus*;
- Sinkronisasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- Penataan Standar Penjaminan Mutu;
- Penataan Pedoman Akademik.

2. Penataan Bidang Akademik

- Penataan Administrasi Mahasiswa Pascasarjana;
- Penataan Pedoman Akademik;
- Penataan *Home Base* dan *Activity Base Dosen*.
- Penataan Bidang Profesi
- Penyesuaian Waktu Belajar yang sebelumnya 9 bulan menjadi 3 bulan dengan metode rekognisi pembelajaran lampau.

c. Penataan Kurikulum

Institut Pemerintahan Dalam Negeri telah melakukan revisi terhadap kurikulum lama melalui Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 423.5-499 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Terintegrasi Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kurikulum ini dibentuk melalui berbagai kajian dan konsinyasi dengan berbagai pihak guna menentukan metode yang tepat melalui serangkaian rapat, FGD dengan berbagai *stakeholder* selaku user dan Alumni, serta pembahasan substansi dan teknis bersama dengan pakar, dan melakukan konsolidasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Penataan kurikulum telah mengakomodasi Kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” dimana Komposisi Kurikulum terdiri atas 60% Praktikum/Pelatihan dan 40% Teori, dengan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Terintegrasi dalam bangunan Kurikulum Program Sarjana Terapan. Kurikulum Jarlatsuh Terintegrasi juga telah mengadopsi Pembelajaran di luar Kampus sebanyak 16 sampai dengan 20 SKS yang terdiri dari Magang 1 sebanyak 4 SKS untuk Satuan Muda Praja, Magang 2 sebanyak 4 SKS untuk Satuan Madya Praja, Magang 3 sebanyak 4 SKS untuk Satuan Nindya Praja dan Bhakti Karya Praja sebanyak 4 SKS untuk Satuan Praja Utama.

d. Penataan Rekrutmen Dosen

Penataan pola rekrutmen Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan melalui Penerbitan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Rekrutmen Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejak tahun 2020 s.d 1 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1.	Lektor	13	2	4	19
2.	Asisten Ahli	10	16	18	44
Total		23	18	22	63

e. Penataan *Home Base* Dosen

Penempatan dosen pada setiap Prodi di IPDN dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi dosen serta kebutuhan program studi. IPDN telah melaksanakan penataan penempatan dosen secara berkelanjutan dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Penataan terbaru ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 424-290 Tahun 2022, dimana sebanyak 293 Orang Dosen terdistribusi ke Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana dengan rincian sebagai berikut.

Fakultas	Program Studi	Jumlah Dosen
Politik Pemerintahan	Studi Kebijakan Publik	30
	Politik Indonesia Terapan	25
	Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	27
Manajemen Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan Daerah	31
	Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	25
	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	27
	Keuangan Publik	27
Perlindungan Masyarakat	Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik	23
	Praktik Perpolisian Tata Pamong	28
	Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
Pascasarjana	Magister Terapan Studi Pemerintahan	12
	Doktor Ilmu Pemerintahan	11
Jumlah		293

Selanjutnya Dosen pada Fakultas sebanyak 62 orang ditempatkan di Kampus Daerah berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 424-289 Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	IPDN Kampus Daerah	Jumlah Dosen
1.	Sumatera Barat	10
2.	Kalimantan Barat	7
3.	Sulawesi Selatan	14
4.	Sulawesi Utara	10
5.	Nusa Tenggara Barat	17
6.	Papua	4
Jumlah		62

f. Penataan Pedoman Akademik

Penyelenggaraan pendidikan pada Program Sarjana Terapan, Program Pendidikan Profesi Keperawat, Program Studi Magister Terapan, dan Program Studi Doktor telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pedoman Akademik ini mengatur secara sistemik, proporsional, dan komprehensif sebagai panduan secara menyeluruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan IPDN untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

g. Penataan Pedoman Akademik



Website SCDB

1. Smart Campus

Teknologi informasi yang diaplikasikan dalam kegiatan percepatan *Smart Campus* IPDN, yaitu *Smart Campus Data Base* (SCDB). Aplikasi SCDB, merupakan pangkalan atau penyedia data dan informasi elektronik yang terintegrasi secara *online* kemudian diintegrasikan ke *website* utama IPDN ipdn.ac.id dan dapat dengan mudah diakses secara umum, khususnya oleh Civitas akademika guna mendapatkan data dan informasi mengenai IPDN.

Secara rinci tujuan penyusunan SCDB adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan satu sistem aplikasi TERPADU dan menyeluruh di lingkungan kampus IPDN;
- b. Mempermudah pengguna dalam mengakses informasi perkembangan seluruh kegiatan secara realtime baik di Kampus Pusat IPDN Jatinangor maupun kampus Jakarta, NTB, Sulut, Sulsel, Kalbar, Sumbar dan Papua melalui PC, Laptop atau Smartphone Android dan IOS;
- c. Memberikan dukungan optimal terhadap aspek penunjang pendidikan, pelatihan dan pengasuhan;
- d. Dapat memonitor perkembangan data secara keseluruhan dan terpusat dalam satu ruang lingkup meliputi kegiatan akademis, keprajaan, kepegawaian, maupun sarana dan prasarana dan lain- lain;
- e. Dapat mengetahui informasi secara akurat dan terkini, utamanya mengenai serapan anggaran/ keuangan, Keprajaan, Kepegawaian baik PNS maupun Non PNS, Perencanaan dan Sarana Prasarana di setiap unit kerja IPDN, yang pada gilirannya merupakan capaian kinerja IPDN secara *comprehensive*;
- f. Proses pemberian sekaligus penerimaan (akses) informasi dari satu program studi ke program studi lain maupun dari satu fakultas ke fakultas lain akan lebih mudah secara *realtime*;
- g. Memberi landasan dalam penyusunan anggaran investasi *Smart Campus Database* (SCDB) secara lengkap, termasuk perwujudan *Command Center*;
- h. Menjamin keamanan data yang tinggi untuk mengantisipasi penyalahgunaan data dan informasi dalam kegiatan sivitas akademika;
- i. Mengintegrasikan atau menyatukan seluruh data dan informasi;
- j. Mengintegrasikan *website* SCDB pada *website* resmi IPDN ipdn.ac.id.

2. E – Learning

E-Learning adalah proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar, adapun secara terperinci aplikasi yang sudah ada dan diterapkan untuk penunjang Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh) secara digital adalah sebagai berikut :

a. Aplikasi *E-learning*

Suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.

b. Aplikasi Sistem Informasi Akademik dan Pelayanan (SIAP)

Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola semua kegiatan administrasi dan operasional perguruan tinggi dengan berbasis cloud server yang terkoneksi dengan aplikasi PD-DIKTI neo Feeder.

Layanan *Google Workspace For Educations*

c. Merupakan produk atau layanan dari *Google* berupa seperangkat *tools* atau alat produktivitas seperti *Google Mail, Google Classroom, Google Meet, Google Document, Google Spreadsheet, Google Formulir, Google Drive, Google Calender*, dan sebagainya yang telah disesuaikan untuk lembaga pendidikan yang digunakan untuk

berkolaborasi dan menjaga kegiatan pembelajaran tetap aman.

d. Aplikasi e-Lapsit Atensi Manggala Praja IPDN

Aplikasi e-Lapsit ATENSI MANGGALA PRAJA IPDN memuat pelaporan siklus kehidupan praja, mulai apel kehadiran praja, upacara makan, aerobik/olahraga, kegiatan ibadah, jam wajib belajar dan kegiatan lainnya dalam siklus kehidupan praja sesuai program kegiatan yang ditetapkan.

3. *E – Library*

E-Library atau perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), koleksi buku-buku elektronik, staf pengelola, pengguna, organisasi, mekanisme kerja, serta layanan dengan memanfaatkan berbagai jenis teknologi informasi. Adapun secara terperinci aplikasi *E-Library* yang sudah ada dan diterapkan untuk penunjang keperluan Civitas Akademika IPDN dan untuk keperluan umum secara digital adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi SLiMS (Otomasi Perpustakaan)

Senayan Library Management System (SLiMS) adalah sistem automasi perpustakaan sumber terbuka (*open source*) yang pertama kali dibangun dan digunakan di Perpustakaan Kemendikbud Ristek.

Adapun fitur yang terdapat dalam SLiMS yaitu:

- *Online Public Access Catalog* (OPAC), untuk memudahkan dalam penelusuran koleksi di perpustakaan;
- *Detail Record*, untuk kebutuhan *web service*;
- Inventaris koleksi;
- Manajemen Data Bibliografi, untuk meminimalisasi redundansi data;
- Manajemen *Masterfile*, untuk data referensial seperti *General Material Designation* (GMD), Tipe koleksi, Penerbit, Pengerang, Lokasi, Supplier;
- Manajemen keanggotaan perpustakaan;
- Sirkulasi, untuk kegiatan peminjaman dan pengembalian koleksi;
- Laporan dan Statistik kegiatan Perpustakaan.

b. Aplikasi *E-prints* (Repositori Institusi)

Aplikasi *E-prints* sebagai sistem penyimpanan karya ilmiah civitas akademika atau bahan pustaka digital.

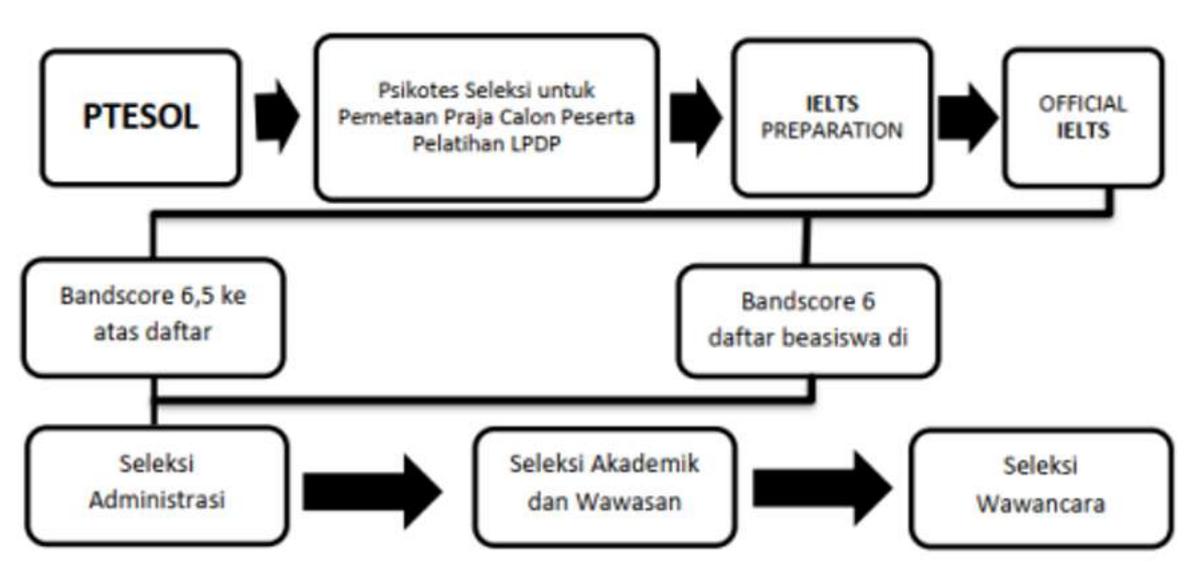
Aplikasi *E-journal*

c. *E-Journal* adalah artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam suatu jurnal ilmiah ber ISSN yang dilakukan oleh suatu institusi melalui media elektronik (*paperless*), dan disebarakan kepada atau bisa diakses seluruh audiens pembaca melalui portal internet yang tersedia.

h. Penataan Persiapan Beasiswa LPDP

Dalam Negeri sehingga lulusan IPDN menjadi *agent of change*, IPDN melalui unit Laboratorium Bahasa telah melaksanakan program pelatihan IELTS dan pelatihan peningkatan kompetensi lainnya bagi Praja Utama guna memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam mendaftar dan mengikuti seleksi beasiswa pendidikan lanjutan melalui program LPDP Kemenkeu. Adapun alur program pelatihan dimaksud adalah sebagai berikut:

Alur Pelatihan Persiapan Seleksi Beasiswa LPDP Kemenkeu



Program pelatihan persiapan seleksi beasiswa LPDP Kemenkeu tersebut telah dilaksanakan dari tahun 2021 s.d. 2022 (sekarang). Dalam penyelenggaraan program pelatihan tersebut, IPDN melalui Unit Laboratorium Bahasa bekerja sama dengan lembaga pendidikan/pelatihan profesional dan berkompeten di bidangnya.

1. Program Pelatihan Seleksi Beasiswa melalui Program LPDP Kementerian Keuangan bagi Praja Utama Angkatan XXVIII pada Tahun 2021

a) Pelaksanaan Pelatihan

- Seleksi Peserta oleh Tim Laboratorium Bahasa dengan Tim Ahli Teknologi Informasi IPDN, secara ringkas dapat kami laporkan bahwa proses seleksi hingga pelaksanaan pelatihan IELTS, diawali dengan pendaftaran melalui google form kepada 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat) Praja Utama dan yang mendaftar sebanyak 211 (dua ratus sebelas) orang, kemudian yang melakukan registrasi ulang sebanyak 206 (dua ratus enam) orang.
- PTESOL (*Proficiency Test of English to Speakers of Other Languages*) kerja sama dengan Balai Bahasa UPI, Praja Utama yang telah melakukan registrasi ulang sebanyak 206 (dua ratus enam) orang kemudian mengikuti seleksi dengan metode PTESOL. Seleksi dilaksanakan secara daring pada tanggal 11 Februari 2022, dikarenakan para Praja Utama masih di daerah masing-masing. Dari hasil PTESOL tersebut kemudian dipilih 56 (lima puluh enam) orang dengan nilai 485 (empat ratus delapan puluh lima) ke atas.

- IELTS *Preparation* kerja sama dengan Balai Bahasa UPI, Pelatihan IELTS *Preparation* dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) Jam Pelajaran dalam 30 (tiga puluh) pertemuan di Gedung Laboratorium Bahasa dengan peserta sebanyak 56 (lima puluh enam) orang.
- *Official* IELTS kerja sama dengan *British Council*, setelah mengikuti Pelatihan IELTS *Preparation*, seluruh peserta mengikuti *Official* IELTS pada tanggal 28 April 2022, dengan jumlah yang mendapatkan *band score* 6,5 (enam koma lima) ke atas sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- *Microsoft Office Specialist* kerja sama dengan DSTI ITB, untuk meningkatkan kemampuan para peserta dibidang teknologi informasi, seluruh peserta diberikan pelatihan *Microsoft Office Specialist* selama 18 (delapan belas) jam pelajaran.

b) Hasil Seleksi Beasiswa LPDP

Dalam mengikuti seleksi beasiswa LPDP, Pamong Praja Muda Alumni Pelatihan IELTS melalui 3 (tiga) tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi, seleksi substansi akademik dan kebangsaan serta seleksi wawancara. Dari 21 (dua puluh satu) orang, yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi pada tanggal 9 sampai dengan 23 September 2021 adalah 18 (delapan belas) orang. Selanjutnya, dalam tahap seleksi substansi akademik dan kebangsaan pada tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021, dinyatakan lolos sebanyak 6 (enam) orang, sehingga jumlah peserta yang melanjutkan ke tahap seleksi wawancara pada tanggal 25 Oktober sampai 26 November 2021 sebanyak 6 (enam) orang dan dinyatakan lolos serta berhak mendapatkan beasiswa sebanyak 1 (satu) orang yakni Sdr. Gritje Widya Paulina Monim asal Provinsi Papua di Yonsei University, Korea Selatan dengan jurusan *International Trade, Finance and Management*.



2. Pelaksanaan Program Pelatihan Seleksi Beasiswa melalui Program LPDP Kementerian Keuangan Tahun 2022.

a) Pelaksanaan Pelatihan

- PTESOL (*Proficiency Test of English to Speakers of Other Languages*) kerja sama dengan Balai Bahasa UPI, dari jumlah Praja Utama Angkatan XXIX sebanyak 1.993 (seribu 96 sembilan ratus sembilan puluh tiga) orang yang mengikuti seleksi peserta dengan metode PTESOL sebanyak 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan) orang. Kegiatan PTESOL dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 18 Februari 2022 di Blok Fakultas Politik Pemerintahan. Selanjutnya, dipilih 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) Praja Utama

- rangking terbaik untuk mengikuti tahap seleksi psikotes;
- Psikotes Seleksi untuk Pemetaan Praja Utama Calon Peserta Pelatihan LPDP yang dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan Center Tunas Unggul. Kegiatan psikotes diselenggarakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Februari 2022, bertempat di Balairung Rudini. Kemudian hasil psikotes tersebut akan digunakan sebagai penilaian untuk memilih dan menetapkan 200 (dua ratus) orang terbaik sebagai peserta pelatihan IELTS *Preparation*;
 - IELTS *Preparation* kerja sama dengan Balai Bahasa UPI, Pelatihan IELTS *Preparation* dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) Jam Pelajaran dalam 30 (tiga puluh) pertemuan di Gedung Laboratorium Bahasa dengan jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang. Kegiatan dilaksanakan pada rentang waktu Bulan Maret s.d. Juni 2022.
 - *Official IELTS* kerja sama dengan British Council, setelah mengikuti Pelatihan IELTS *Preparation*, seluruh peserta mengikuti *Official IELTS* dengan jumlah yang mendapatkan band score 6 (enam) dan 6,5 (enam koma lima) ke atas sebanyak 104 (seratus empat) orang. Peserta pelatihan LPDP Tahun 2022 ditempatkan di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dalam rangka memudahkan untuk kegiatan pelatihan persiapan pendaftaran LPDP Tahun 2022.
 - *Internet and Computing Core Certification (IC3)* kerja sama dengan ITC, untuk meningkatkan kemampuan para peserta dibidang teknologi informasi, seluruh peserta diberikan pelatihan IC3 dengan output kegiatan berupa sertifikat yang diakui internasional.
 - Pendampingan Seleksi Beasiswa LPDP Kemenkeu, guna meningkatkan kesiapan para pamong praja muda yang akan mengikuti seleksi beasiswa LPDP, maka diberikan pendampingan dalam 2 (dua) tahap, yakni bersama Yayasan Nasional Global Sejahtera, yang terdiri dari tim psikolog dan awardee beasiswa LPDP serta Tim Pendamping Seleksi Beasiswa LPDP (terdiri dari para dosen Bahasa Inggris serta alumni IPDN yang telah mendapatkan beasiswa pendidikan lanjutan ke luar negeri).

b) Hasil Seleksi Beasiswa LPDP

Pada tanggal 8 s.d. 19 Agustus 2022, sebanyak 104 (seratus empat) orang mengikuti seleksi administrasi LPDP Tahun 2022 berupa pemenuhan dokumen persyaratan yang harus diunggah pada masing-masing akun pendaftaran LPDP Tahun 2022. Pada tanggal 22 Agustus 2022, diumumkan hasil pendaftar yang lulus seleksi administrasi. Peserta pelatihan persiapan pendaftaran LPDP dari IPDN sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang.

Pada tanggal 29 Agustus s.d. 10 September 2022, sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yang mengikuti seleksi Tes Bakat Skolastik yang terdiri dari empat sub-tes yakni sub-tes verbal, sub-tes kuantitatif, sub-tes penalaran, dan sub tes kepribadian. Pada tanggal 15 September 2022, diumumkan hasil pendaftar yang lulus seleksi Tes Bakat Skolastik LPDP dari IPDN sebanyak 61 (enam puluh satu) orang.

Pada tanggal 26 September s.d. 4 November 2022, berlangsungnya kegiatan tes wawancara oleh peserta pelatihan pendaftaran LPDP Tahun 2022 di IPDN. Berdasarkan hasil yang diumumkan pada tanggal 11 November 2022, maka pamong praja muda yang dinyatakan lolos dan berhak mendapatkan beasiswa LPDP Kemenkeu sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan identitas sebagai berikut:

- Jalur Afirmasi (Papua dan Papua Barat) lolos sebanyak 6 (enam) orang, sebagai berikut:
 1. Celine Kakauhe (*National University of Ireland Galway / Irlandia*)
 2. Cicilia Yuspince Novela Syama (*Erasmus University / Belanda*)
 3. Dimas Satrio Yudho (*The University of Arizona / Amerika Serikat*)
 4. Aldi Gumuruh Wicaksono (*Universitas Airlangga / Indonesia*)
 5. Andrew Bagus Priyo Utomo (*Universitas Gajah Mada / Indonesia*)
 6. Jeremy Given Adriel Orlando Panjaitan (*Universitas Indonesia / Indonesia*)
- Jalur Reguler lolos sebanyak 1 (satu) orang (Prov. Sumatera Utara) atas nama Jhonatan Timoty B Aruan (*The University of Birmingham / Inggris*)

i. Penataan Pengasuhan

Penataan bidang pengasuhan telah dilakukan dengan mengadopsi penerapan Teknologi Informasi dalam Penataan Kehidupan Praja. Upaya untuk mewujudkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai *Smart Campus*, melalui penggunaan teknologi informasi pada proses pembelajaran di lingkungan IPDN dalam sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (JARLATSUH). Pada Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni khususnya Bagian Pengasuhan sebagai bentuk Pendidikan di dalamnya memuat dan mengatur siklus kehidupan praja sudah mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi berupa sistem informasi berbasis aplikasi yang diberi nama e-lapsit ATENSI Manggala Praja Pengasuhan. Penggunaan Aplikasi pada Bagian Pengasuhan berupa Aplikasi e-Lapsit ATENSI Manggala Praja IPDN ini memuat pelaporan siklus kehidupan praja, mulai apel kehadiran praja, upacara makan, aerobik/olah raga, kegiatan ibadah, jam wajib belajar dan kegiatan lainnya dalam siklus kehidupan praja sesuai program kegiatan yang ditetapkan. Laporan situasi dan kondisi mulai tingkat wisma, tingkat wira, tingkat sena maupun keseluruhan Satuan Manggala Praja baik di IPDN Kampus Jatinangor, maupun IPDN Kampus Jakarta, IPDN Kampus Sumatera Barat, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat, IPDN Kampus Kalimantan Barat, IPDN Kampus Sulawesi Selatan, IPDN Kampus Sulawesi Utara, IPDN Kampus Papua. Sistem informasi dan aplikasi ini terintegrasi sebagai laporan siklus kehidupan praja, baik di IPDN Kampus Jatinangor, IPDN Kampus Jakarta maupun seluruh IPDN Kampus Daerah.

Laporan siklus kehidupan praja dapat dilakukan langsung dari smartphone dan dilengkapi berbagai fitur laporan kehadiran yang bisa diakses oleh jajaran Satuan Manggala Praja dan Pimpinan IPDN. Data dan informasi yang dilaporkan secara akurat, valid dan real-time dalam pelaksanaan siklus kehidupan praja dapat terpantau dan menjadi bahan pengambilan keputusan pimpinan.

Selain itu, saat ini IPDN sedang mempersiapkan Pembaharuan Sistem Penilaian Pengasuhan Praja, adalah dengan Menerapkan Metode Penilaian 360 Derajat yang juga dibarengi dengan digitalisasi pada

platform media pemberian nilai tersebut. IPDN juga akan dilakukan Digitalisasi Layanan Administrasi Praja, antara lain untuk Layanan Surat Keterangan Praja, Surat Rekomendasi dan Surat Ijin Meninggalkan Kampus

j. Penataan Ekstra Kurikuler

1. Sub Bagian Pembinaan Organisasi Praja.

Pada sub bagian pembinaan organisasi Praja yang telah dilakukan perubahan yaitu mengganti peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Struktur dan tata Kerja Manggala Korps Praja dengan Peraturan yang Baru yaitu peraturan rektor Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi Keprajaan. Peraturan ini mengatur mengenai Manggala Korps Praja, Sena Korps Praja (Fakultas), Badan Perwakilan Praja Institut dan Badan Perwakilan Praja Fakultas serta mengatur atribut yang digunakan oleh Perangkat Organisasi Keprajaan.

2. Sub Bagian Seni dan Olahraga

Pada sub bagian seni dan Olahraga yang telah dilakukan perubahan meliputi:

- Telah melakukan Perjanjian Kerja Sama bersama pelatih profesional (Gita Pakuan) yang menangani latihan anggota Drum Band Gita Abdi Praja.
- Telah melakukan Perjanjian Kerja Sama bersama pelatih profesional yang menangani Paduan Suara, Vokal dan Penyanyi solo.
- Telah melakukan Perjanjian Kerja Sama bersama pelatih profesional yang menangani Band Praja.

Sub Bagian Kerohanian

3. Pada sub bagian Kerohanian yang telah dilakukan perubahan meliputi;

- Adanya pengurus DKM yang baru dan penempatan personil di masjid.
- Untuk pelatihan dan kegiatan Praja Muslim telah bekerja sama dengan kantor Agama Jawa Barat untuk mengisi kegiatan- kegiatan keagamaan Praja Muslim dan kegiatan Seminar keagamaan.

k. Penataan Rumah Dinas Tanpa Kekerasan

Bentuk penataan lainnya yang dilaksanakan oleh IPDN adalah pengosongan rumah dinas dosen dan karyawan IPDN kampus Jakarta, yang selama ini masih ditempati oleh mantan pegawai atau keluarganya. IPDN telah berhasil melakukan penataan berupa pengosongan dari penghuni yang tidak berhak, dan pengisian penghuni baru dari dosen dan pegawai IPDN yang berhak sesuai ketentuan. Dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, IPDN telah mampu melakukan penataan rumah dinas tanpa adanya kekerasan.

8.2 Pembangunan

Selama dua tahun terakhir, IPDN telah melakukan pembangunan berbagai prasarana akademik dan penunjang akademik, antara lain:

1. Pembangunan Perpustakaan IPDN Kampus Pusat Jatinangor
2. Pembangunan Ruang *Command Centre*
3. Pembangunan Laboratorium Prodi Studi Keuangan Publik Kampus Jakarta
4. Pembangunan Gapura IPDN Kampus Jakarta
5. Pembangunan Kantin IPDN Kampus Jakarta



Sebelum



Sesudah

Pembangunan Laboratorium Prodi Studi Keuangan Publik Kampus Jakarta
Tahun Pengerjaan 2021



Sebelum



Sesudah

Pembangunan Kantin IPDN Kampus Jakarta
Tahun Pengerjaan 2021



Sebelum



Sesudah

Pembangunan Gapura IPDN Kampus Jakarta
Tahun Pengerjaan 2021

8.3 Renovasi

Selama dua tahun terakhir, IPDN telah melakukan renovasi berbagai prasarana akademik dan penunjang akademik, antara lain:

1. Renovasi Menza IPDN Kampus Pusat Jatinangor
2. Renovasi Balairung Rudini
3. Renovasi Ruang Rektorat Kampus Jatinangor
4. Renovasi Aula Zamhir Islamie
5. Renovasi Gedung Sekolah Pascasarjana Kampus Jakarta
6. Renovasi Gedung Utama IPDN Kampus Jakarta



Sebelum



Sesudah

Renovasi Aula Zamhir Islamie
Tahun Pengerjaan 2021

Renovasi Gedung Utama IPDN Kampus Jakarta



Sebelum



Sesudah

Renovasi Ruang Tamu Loka Abhyagata
Tahun Pengerjaan 2020



Sebelum



Sesudah

Renovasi Ruang Rapat Sabhayatama
Tahun Pengerjaan 2020



Sebelum



Sesudah

Renovasi Ruang Rapat *Video Conference*
Tahun Pengerjaan 2020

BAGIAN IX

PENUTUP

IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang telah membuktikan eksistensi dan kontribusinya dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan di dalamnya yang mengutamakan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) secara terintegrasi merupakan salah satu keunggulan dan faktor pembeda IPDN dengan perguruan tinggi lainnya. Sistem ini terus dipertahankan dan dikembangkan untuk menghasilkan profil lulusan IPDN sebagai pamong praja muda kader pemerintahan dalam negeri yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada saat yang sama, IPDN senantiasa terus menyesuaikan tata kelola organisasi melalui berbagai program penataan, pengembangan dan penyempurnaan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan tata kelola di dalamnya supaya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khas IPDN. Berbagai upaya tersebut telah dipaparkan pada buku ini, sebagai bagian dari informasi, transparansi dan akuntabilitas IPDN terhadap masyarakat.

Buku Profil Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait perkembangan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan selama selang waktu Tahun 2020-2022.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

IPDN Kampus Jatinangor
Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor - Sumedang 45363.

Website
ipdn.ac.id

YouTube
Humas IPDN

Facebook
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Instagram
[humasipdn.id](https://www.instagram.com/humasipdn)

Twitter
[humasipdn](https://twitter.com/humasipdn)

